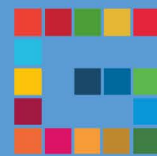




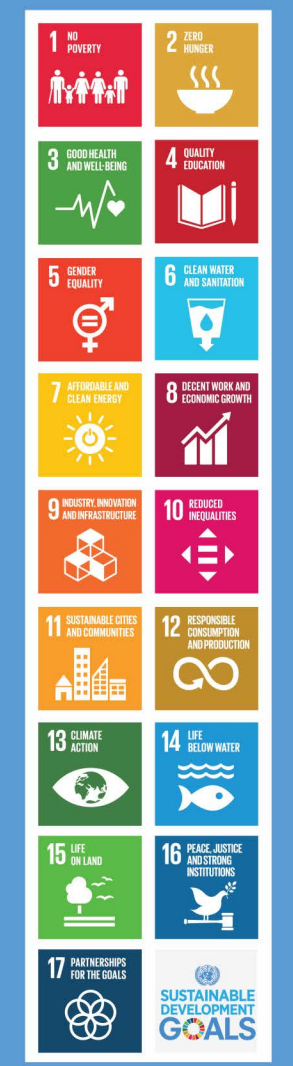
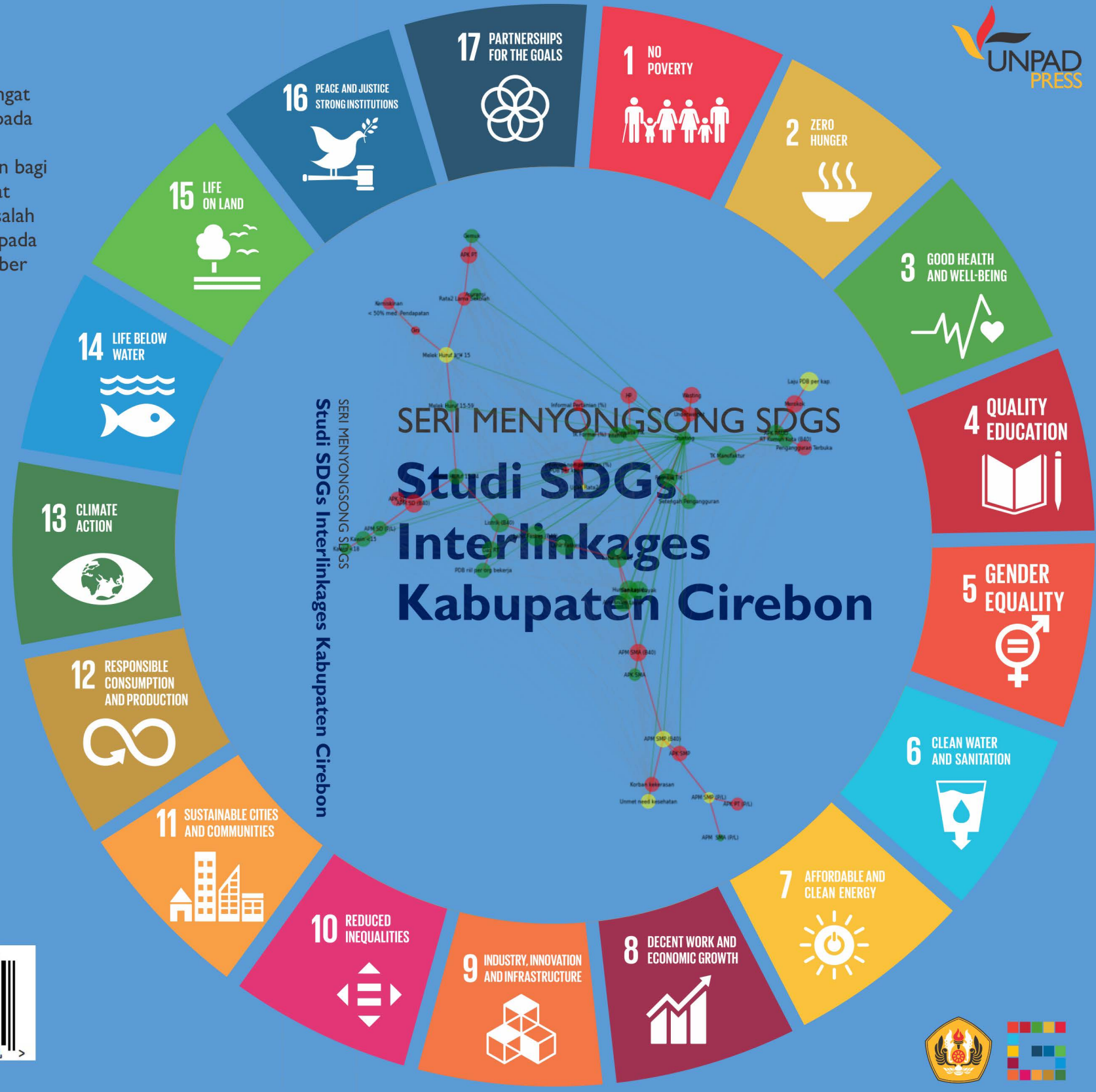
Kebutuhan akan riset analisis interlinkages menjadi sangat mendesak, mengingat perjalanan SDGs sudah sampai pada tahun ke 5, dan masuk pada era “built better”. Kondisi pandemic COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan bagi pelaksanaan SDGs, dimana sumber daya menjadi sangat terbatas. Perencanaan yang matang tentunya menjadi salah satu hal krusial yang mengarahkan pelaksanaan SDGs pada jalur yang seharusnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Prof Zuzy Anna
Direktur SDGs Center UNPAD



Center for Sustainable Development Goals Studies
Gedung CISRAL UNPAD
Jl. Dipatiukur No. 46, Bandung, 40132
Jawa Barat, Indonesia

- sdgcenter@unpad.ac.id
- [SDGsCenterUnpad](https://www.facebook.com/SDGsCenterUnpad)
- [@SDGsCenterUnpad](https://twitter.com/SDGsCenterUnpad)
- [SDGs Center Unpad](https://www.youtube.com/channel/UC...)
- <http://sdgcenter.unpad.ac.id>



Studi SDGs Interlinkages Kabupaten Cirebon

TIM PENULIS

Ahmad Komarulzaman

Zuzy Anna

Arief Anshory Yusuf

Robi Andoyo

Herlina Napitupulu

Aisyah Amatul Ghina

Putri Riswani Halim

Copyright@2020
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan 1, 2020
Diterbitkan oleh Unpad Press
Grha Kandaga, Gedung Perpustakaan Unpad Jatinangor, Lantai I
Jl. Ir. Soekarno km 21 Bandung 45363
Telp. (022) 84288888 ext 3806
e-mail : press@unpad.ac.id /pressunpad@gmail.com
<http://press.unpad.ac.id>
Anggota IKAPI dan APPTI

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ahmad Komarulzaman, et all

Studi SDGs Interlinkages Kabupaten Cirebon/ Penulis, Ahmad
Komarulzaman, et all ; , --Cet. 1 – Bandung; Unpad Press; 2020

xvi, 125 h.; 16 x 24 cm

ISBN 978-602-439-935-1

I. Judul II. Ahmad Komarulzaman, et all

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya buku “Studi SDGs Interlinkages Kabupaten Cirebon” telah selesai dan dapat diterbitkan. Buku ini menjadi salah satu hasil riset tim SDGs Center Universitas Padjadjaran yang membahas mengenai analisis interlinkages diantara berbagai indikator yang ada dalam kaitan mencari indikator yang paling memiliki dampak sistemik pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cirebon. Untuk tingkat Kabupaten/Kota riset mengenai interlinkages ini adalah yang kedua kalinya dilakukan setelah sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bekasi.

Kebutuhan akan riset analisis interlinkages menjadi sangat mendesak, mengingat perjalanan SDGs sudah sampai pada tahun ke 5, dan masuk pada era “built better”. Kondisi pandemic COVID-19 juga menjadi salah satu tantangan bagi pelaksanaan SDGs, dimana sumber daya menjadi sangat terbatas. Perencanaan yang matang tentunya menjadi salah satu hal krusial yang mengarahkan pelaksanaan SDGs pada jalur yang seharusnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

Analisis interlinkages menjadi bagian terpenting dalam perencanaan implementasi SDGs, dengan memberikan arahan mengenai hubungan dan keterkaitan indikator SDGs pada suatu wilayah, dan memberikan rekomendasi indikator prioritas untuk implementasi SDGs. Hasil riset terkait interlinkages SDGs ini diharapkan dapat menjadi *benchmark* bagi riset-riset sejenis yang harusnya dilakukan di setiap wilayah untuk implementasi SDGs yang lebih terarah.

Semoga buku ini memberikan sumbangan pemikiran dan juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, khususnya pemerintah, dan juga bagi akademisi serta *stakeholders* lainnya. Kekurangan yang ada dalam buku ini sepenuhnya

kesalahan kami, dan saran serta masukan untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan.

Bandung, 12 Desember 2020

Prof. Dr. Zuzy Anna, M.Si., S.Si
Direktur SDGs Center

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kajian	2
1.3 Sistematika Penulisan	3
Bab 2 KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	4
2.2 Prinsip SDGs.....	6
2.3 Pilar SDGs	9
2.4 SDGs Interlinkages	10
Bab 3 METODOLOGI	19
3.1 Data.....	19
3.2 Metadata Indikator SDGs	26
3.3 Metodologi Penelitian.....	72
Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	80
4.1 Performa Indikator SDGs	80
4.2 Proximity	87
4.3 Centrality	88
4.4 Density	89

Bab 5 REKOMENDASI INDIKATOR PRIORITAS.....	92
5.1 Visualisasi Network SDGs Interlinkages.....	92
5.2 Indikator Prioritas Penanganan Stunting Kab. Cirebon	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Pemetaan Tujuan SDGs terhadap Pilar SDGs.....	9
Tabel 3.1	Daftar Indikator SDGs di Kabupaten Cirebon	20
Tabel 3.2	Daftar Indikator Terpilih untuk Studi SDGs <i>Interlinkages</i> di Kabupaten Cirebon.....	72
Tabel 4.1	Indikator <i>Over-Performing</i> di Kabupaten Cirebon	82
Tabel 4.2	<i>Centrality</i> dari Indikator SDGs	88
Tabel 4.3	Density Kabupaten Cirebon	90
Tabel 5.1	Indikator <i>Prioritas Penanganan Stunting</i> di Kabupaten Cirebon	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Prinsip universality SDGs (5P)	7
Gambar 2.2	Jaringan Tujuan SDGs yang Terintegrasi	8
Gambar 2.3	Implementasi SDGs: langkah-langkah yang diambil dan kesenjangannya	10
Gambar 2.4	Perbandingan tahapan implementasi SDG: literatur dan ahli versus praktik yang dilakukan negara	11
Gambar 2.5	Perbandingan tahapan implementasi SDG: pendekatan berbasis bukti dan sains.....	12
Gambar 2.6	Kerangka penelitian yang diadopsi dalam penilaian.....	13
Gambar 2.7	<i>Network analysis</i> dari <i>interlinkages</i> antara target- target SDG	14
Gambar 2.8	Jaringan dari indikator di Asia-Pasifik.....	15
Gambar 2.9	Jaringan dari negara-negara berdasarkan <i>proximity</i>	16
Gambar 4.1	Ilustrasi Pengelompokan Performa	81

Gambar 4.2	Performa dari indikator SDGs terhadap pendapatan perkapita	83
Gambar 4.3	Matriks <i>Proximity</i> Indikator SDGs.....	87
Gambar 5.1	Network indikator-indikator SDGs Kabupaten Cirebon. .	94

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan visi dan misi global yang menjadi keniscayaan dan tidak dapat dihindari lagi oleh seluruh pemerintahan di dunia, dalam pencapaiannya di tahun 2030. Berbeda dari *Millennium Development Goals* (MDGs), yang relatif lebih sederhana dengan hanya 8 tujuan, 18 target dan 67 indikator, SDGs mengakomodasikan lebih banyak dan lebih ambisius lagi, dengan komposisi 17 Tujuan, 169 target dan 241 indikator. Secara umum SDGs ini meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup dan menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola. Seluruh target ini diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, tanpa terkecuali.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, pencapaian SDGs tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah seperti dimandatkan dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017, wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang diutamakan pada pemerintah Provinsi. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RAD ini menjadi sangat penting mengingat, ke depan RAD SDGs ini harus di-*mainstreaming*-kan dengan RPJM/RPJMD yang akan disusun kemudian.

Kabupaten/Kota dalam hal ini tentu juga diharapkan dapat menyusun RAD-nya, terutama untuk kepentingan Kabupaten Kota sendiri sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD. Kedepan RPJMD haruslah berisi program dan kegiatan yang terkait SDGs. Untuk itu menjadi penting bagi Kabupaten/Kota, selain mengisi matriks 2 yang menjadi kewajiban untuk lampiran RAD Provinsi, juga menyusun RAD SDGs nya sendiri untuk kepentingan penyusunan RPJMD-nya.

Dalam penyusunan RAD dan implementasi SDGs tersebut diperlukan kajian terhadap keterkaitan SDGs. Keterkaitan antara indikator, target, dan tujuan SDGs memberikan sinyal bahwa setiap elemen SDGs saling berhubungan. Hubungan tersebut dapat memberikan petunjuk mana yang menjadi prioritas dalam penyusunan RAD. Sehingga tidak terjadinya pendanaan ganda untuk suatu indikator, atau dapat meminimalisir penganggaran pada beberapa indikator. Dengan demikian dapat ditentukan indikator mana yang akan menjadi prioritas dalam perencanaan untuk mewujudkan SDGs, khususnya di Kabupaten Cirebon.

1.2 Tujuan Kajian

Kegiatan Penelitian Keterkaitan SDGS di Kabupaten Cirebon ini secara umum pada dasarnya bertujuan untuk mengarusutamakan SDGs dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon, sehingga Kabupaten Cirebon dapat berkontribusi bagi pencapaian SDGs Provinsi dan Nasional di tahun 2030. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mengetahui hubungan dan keterkaitan antar indikator SDGs.
- Memberikan arahan terkait indikator prioritas untuk implementasi SDGs Kabupaten Cirebon.
- Penguatan kapasitas SDM Bappeda Kabupaten Cirebon melalui pelatihan analisis *SDGs Interlinkages*.

1.3 Sistematika Penulisan

Buku ini terdiri dari lima bagian. Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang, penyusunan rumusan masalah yang menjadi landasan dilakukannya kajian, tujuan, sasaran dan keluaran kajian. Bab kedua membahas kajian pustaka yang terkait dengan kajian ini. Bab ketiga berisi mengenai metodologi, spesifikasi model penelitian beserta jenis dan sumber data variabel yang digunakan, baseline SDGs, dan perhitungan SDGs Interlinkages. Bab keempat menguraikan hasil analisis dari studi *interlinkages* SDGs di Kabupaten Cirebon. Buku ini ditutup dengan bab kelima yang berisi rekomendasi indikator prioritas untuk pencapaian SDGs, khususnya penanganan *stunting*, di Kabupaten Cirebon.

Bab 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

SDGs merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs hanya memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 67 indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs hanya memberikan tanggung jawab pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tetapi tidak memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga pelaksanaannya dianggap eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah. Pada tahun 2015, Indonesia berhasil mencapai 49 indikator MDGs dari 67 indikator.

Menjelang berakhirnya MDGs, the United Nations (UN) menyelenggarakan konferensi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012 (sering disebut dengan konferensi Rio+20). Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen *the future we want* yang sangat berperan penting dalam kemunculan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs dibangun dari keberhasilan MDGs dalam memobilisasi aksi serangkaian tujuan yang disepakati secara global. Poin paling penting dari dokumen tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan berkelanjutan baru untuk melanjutkan MDGs, namun dengan visi yang lebih luas, holistik dan bersifat universal.

Menindaklanjuti konferensi Rio+20, UN membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas untuk menyiapkan proposal mengenai konsep pembangunan berkelanjutan paska MDGs pada 22 Januari 2013. Kelompok kerja tersebut terdiri dari 30 anggota negara, termasuk Indonesia sebagai perwakilan dari grup Asia Pasifik. Setelah melakukan negosiasi antar negara, dokumen akhir yang dihasilkan diadopsi oleh lebih dari 150 pemimpin dunia dalam *The UN Sustainable Development Summit* yang diselenggarakan pada 25-27 September di New York, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh negara yang hadir mendeklarasikan secara bersama untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, yakni *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berbeda dengan MDGs, SDGs mengakomodasi masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif. SDGs menginginkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sarannya. SDGs juga bersifat universal dalam memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Secara prinsip, MDGs fokus terhadap permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang dan tertinggal, di mana negara-negara maju lebih banyak berperan sebagai pendonor (ODI, 2015; Sachs, 2015). Dalam penerapannya, SDGs diharapkan dapat dicapai oleh seluruh negara karena memiliki prinsip “*no one is left behind*” (yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 2.2). Sebagai contoh, tujuan ke-12 menunjukkan bagaimana kepentingan dari seluruh negara terwakili di dalam SDGs. Tujuan ini mengisyaratkan bahwa semua pihak harus mengupayakan untuk, misalnya, tidak menggunakan material berbahaya dalam kegiatan konsumsi dan produksi. Adanya peraturan-peraturan internasional dan

perjanjian bilateral yang melarang penggunaan material tertentu dalam aktifitas ekspor dan impor merupakan salah satu contoh upaya konkrit. Oleh karena itu, banyaknya tujuan pembangunan dalam SDGs, selayaknya diartikan sebagai sebuah visi global bersama yang mewakili kepentingan semua pihak, bukan visi global yang terlalu ambisius atau tidak realistis.

Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pencapaian TPB/ SDGs tertuang pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (seperti telah disebutkan sebelumnya). Upaya-upaya pencapaian TPB/ SDGs diawali dengan pembentukan tim pelaksana SDGs, penyusunan dokumen peta jalan TPB/ SDGs, rencana aksi nasional (RAN) TPB/ SDGs, rencana aksi daerah (RAD) TPB/SDGs, selanjutnya pelaksanaan RAN dan RAD TPB/ SDGs, dan diakhiri dengan pengukuran pencapaian pelaksanaan RAN dan RAD TPB/ SDGs serta merencanakan kelanjutan dari SDGs.

2.2 Prinsip SDGs

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menyelaraskan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik Sachs (2015). Contohnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi oleh distribusi pendapatan yang merata, melalui penciptaan lapangan kerja dengan upah layak. Hal ini dikarenakan disparitas pendapatan yang tinggi dapat menciptakan konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tersebut harus ramah lingkungan dengan misalnya, tidak mencemari udara atau menghabiskan sumber daya alam. Keberadaan pemerintahan yang baik diperlukan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai.

SDGs merupakan visi global (*universality*) bersama yang mewakili kepentingan semua aspek yang lebih menekankan pada 5P (gambar 2.1), 5 hal yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1. *People* (manusia), 2. *Planet* (bumi), 3. *Prosperity* (kemakmuran), 4. *Peace* (perdamaian), dan 5. *Partnership* (kerjasama).



Gambar 2.1
Prinsip universality SDGs (5P)

Sumber: website pressroom.oecs.org

Prinsip 5P ini dapat diartikan sebagai berikut, *People*: SDGs hadir untuk memastikan bahwa semua manusia terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat; *Planet*: SDGs berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan; *Prosperity*: SDGs hadir untuk memastikan semua umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam; *Peace*: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan; *Partnership*: keberhasilan

pencapaian sebuah tujuan, akan berdampak juga pada pencapaian tujuan-tujuan yang lainnya. Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan) dan 10 (kesenjangan) dan merupakan tujuan “pengungkit”, karena memiliki tingkat keterkaitan yang paling besar.

2.3 Pilar SDGs

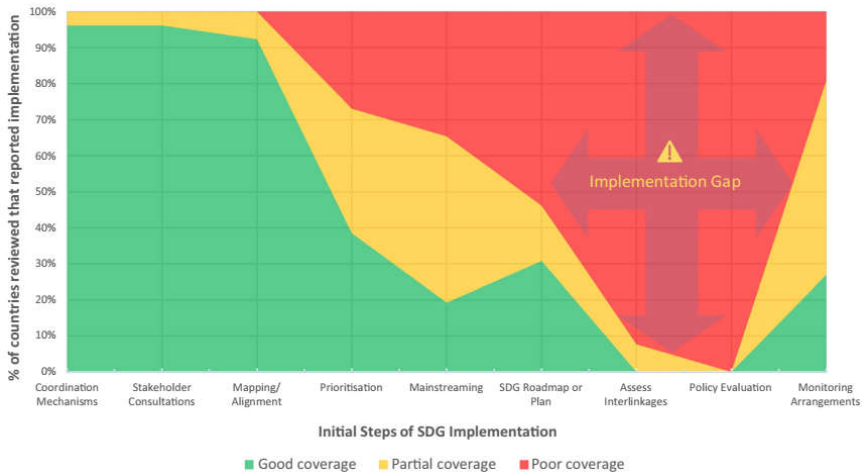
SDGs di Indonesia memiliki 4 (empat) pilar yang melingkupi 17 tujuan, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Berikut ini adalah pemetaan 17 tujuan SDGs ke dalam 4 pilar SDGs (Tabel 2.1):

Tabel 2.1
Tabel Pemetaan Tujuan SDGs terhadap Pilar SDGs

No.	Pilar SDGs	Tujuan SDGs
1	Sosial	1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesetaraan Gender
2	Ekonomi	7. Energi Bersih dan Terjangkau 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3	Lingkungan	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak 11. Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 13. Penanganan Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan
4	Hukum dan Tata Kelola	16. Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat

2.4 SDGs Interlinkages

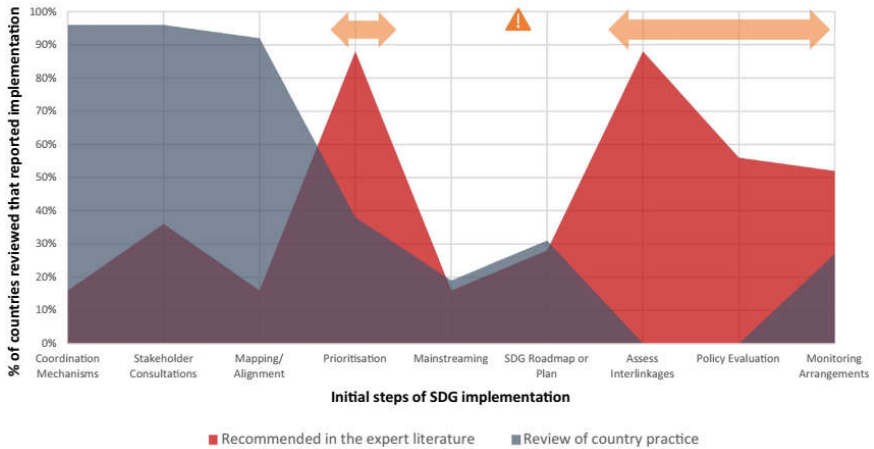
Studi yang dilakukan oleh Allen (2018a) tentang implementasi SDGs pada 26 negara di dunia, menyebutkan bahwa mekanisme koordinasi merupakan salah satu langkah implementasi SDG yang paling banyak dilakukan dan tahapan yang paling sedikit dilakukan atau gap yang paling besar adalah evaluasi kebijakan dan penilaian keterkaitan (*interlinkages*) (lihat Gambar 2.3).



Gambar 2.3
Implementasi SDGs: langkah-langkah yang diambil dan kesenjangannya

Sumber: Allen et al (2018a)

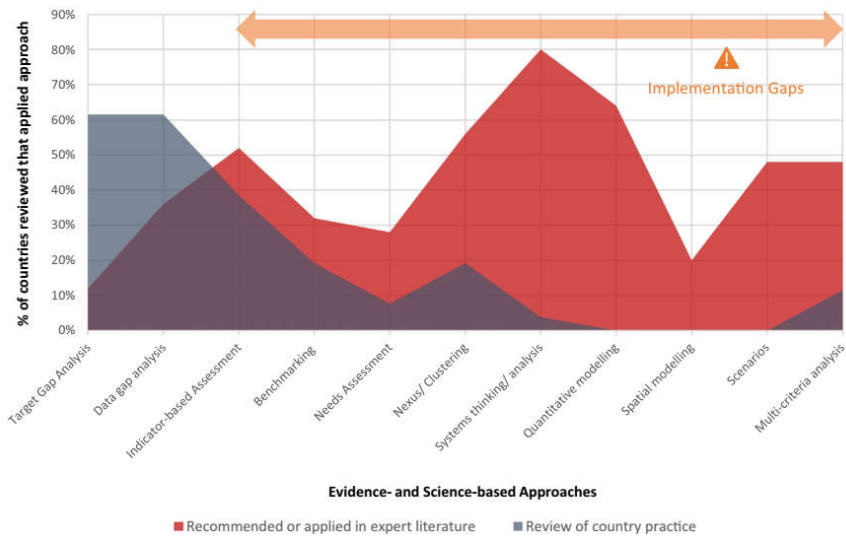
Allen (2018a) juga menggambarkan perbandingan rekomendasi implementasi SDG oleh ahli dengan tahapan yang sudah diselesaikan oleh negara-negara berdasarkan VNRnya. Ahli merekomendasikan atau menargetkan implementasi SDG pada tahapan penilaian *interlinkages*, evaluasi kebijakan, sehingga dapat menentukan prioritas. Pemaparan ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Perbandingan tahapan implementasi SDG:
literatur dan ahli versus praktik yang dilakukan negara

Sumber: Allen et al (2018a)

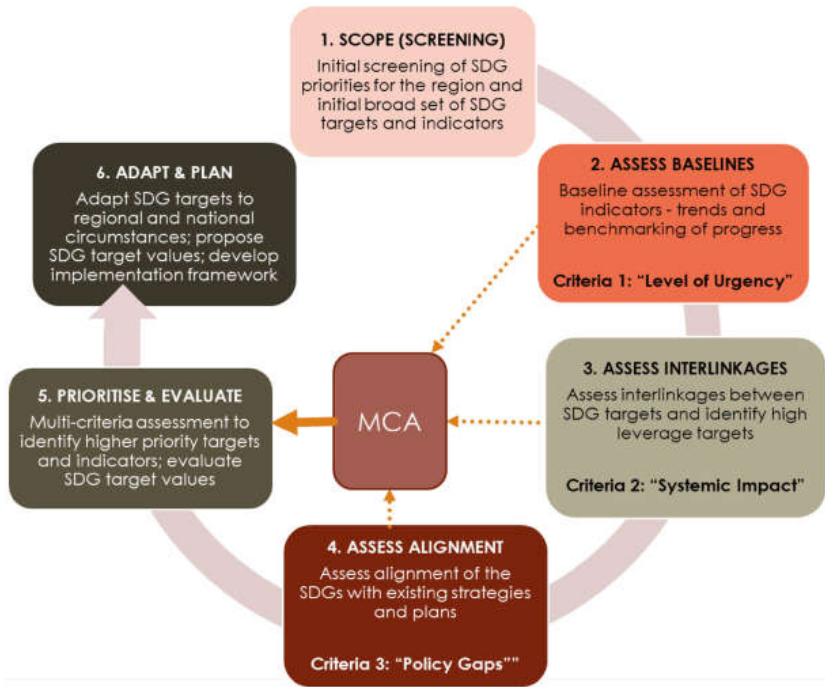
Lebih jauh, Allen (2018a) membandingkan antara ahli dan literatur akademik dengan tahapan yang sudah dilakukan negara berbasis pendekatan bukti dan ilmu pengetahuan (dapat dilihat pada Gambar 2.5). Temuan yang sama dengan sebelumnya, ahli merekomendasikan bahwa kesenjangan implementasi yang menjadi kunci adalah analisis sistem, pendekatan nexus, pemodelan kuantitatif, skenario dan tinjauan ke masa depan, dan kerangka kerja keputusan MCA.



Gambar 2.5
Perbandingan tahapan implementasi SDG:
pendekatan berbasis bukti dan sains

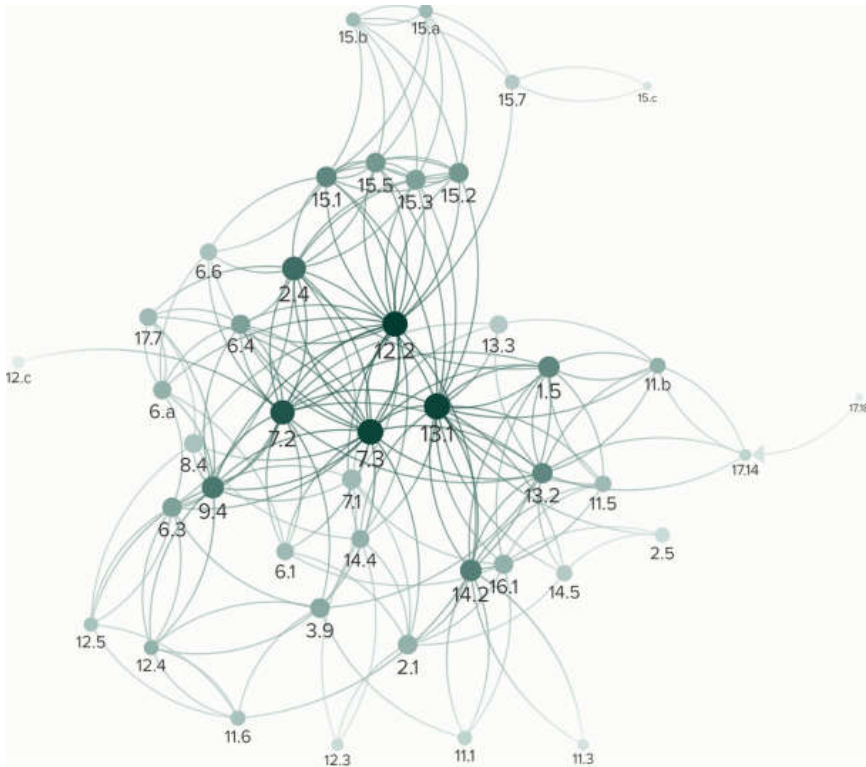
Sumber: Allen et al (2018a)

Studi pada 22 negara-negara di Arab oleh Allen (2018b) dengan metode penelitian *Multi Criteria Analysis* (MCA) yang didasari oleh tingkat urgensi, dampak yang sistemik dan kesenjangan kebijakan. Pendekatan MCA diselesaikan dengan lima tahapan yang termuat dalam Gambar 2.6. Penelitian ini menemukan bahwa yang memiliki dampak positif besar adalah target 7.3 (efisiensi energi), 7.2 (energi terbarukan), 2.4 (produksi pangan yang berkelanjutan), 12.2 (keberlanjutan sumber daya yang digunakan).



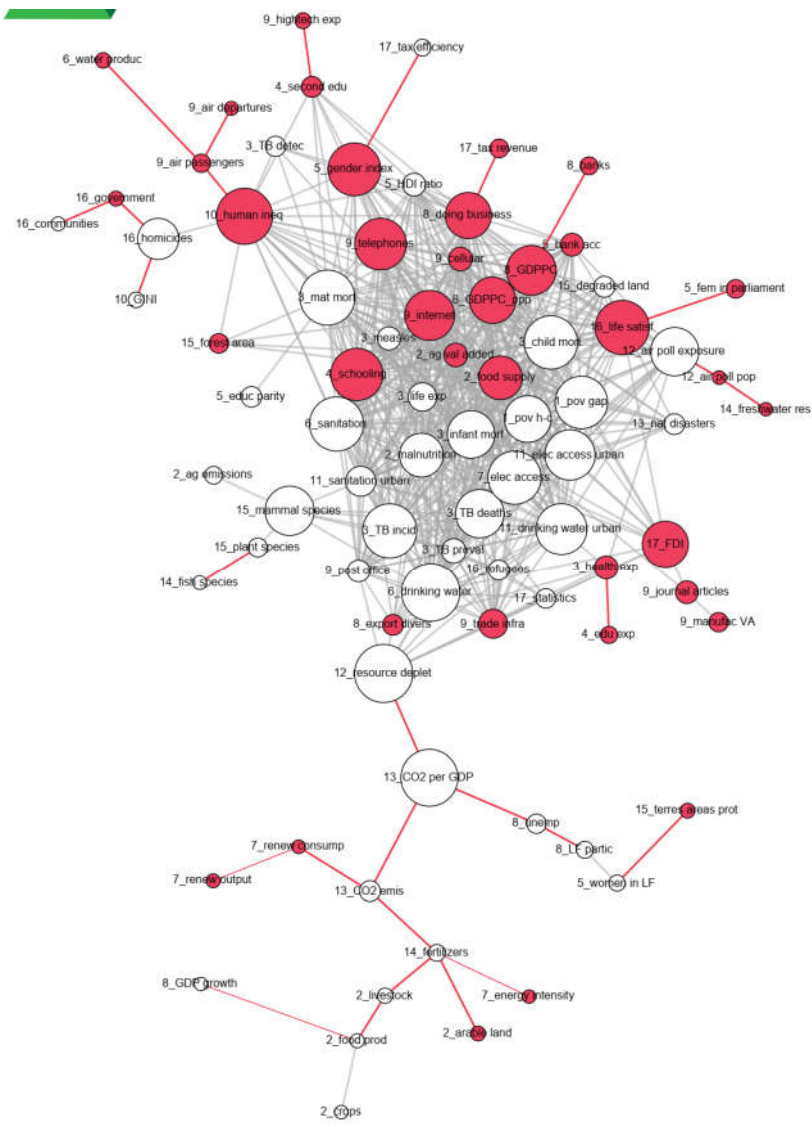
Gambar 2.6
Kerangka penelitian yang diadopsi dalam penilaian

Gambar 2.7 merupakan hasil dari metode *network analysis* dengan aplikasi *metrik outdegree* dan metrik sentralitas kedekatan tidak tertimbang (Allen et al., 2018b). Target yang memiliki lima peringkat tertinggi pada metrik sentralitas kedekatan adalah: 13.1 (ketahanan perubahan iklim), 7.3 (efisiensi energi), 12.2 (penggunaan sumber daya berkelanjutan), 7.2 (energi terbarukan), and 2.4 (produksi pangan berkelanjutan). Lima peringkat tertinggi yang sama pada metrik *outdegree*, yang membedakannya hanyalah urutan saja: 12.2 (penggunaan sumber daya berkelanjutan), 7.3 (efisiensi energi), 13.1 (ketahanan perubahan iklim), 7.2 (energi terbarukan) and 2.4 (produksi pangan berkelanjutan).



Gambar 2.7
Network analysis dari interlinkages antara target- target SDG

Berdasarkan laporan UNESCAP, dengan menggunakan analisis jaringan (network analysis) untuk 82 indikator dari 17 tujuan dari 174 negara. Gambar 2.8 merepresentasikan jaringan dari negara-negara di Asia Pasifik (*Countries with Special Needs*), indikator sosial ekonomi memiliki inti yang rapat dan saling terkait dengan bagian luar yang termasuk indikator lingkungan (UNESCAP, 2016).



Gambar 2.8
Jaringan dari indikator di Asia-Pasifik

UNESCAP juga memberikan gambaran jalur potensial untuk pencapaian SDGs. Jalur tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.9. Untuk Indonesia sendiri memiliki jalur potensial yang relatif sama dengan Vietnam, China,

Studi yang dilakukan El-Maghrabi (2018) dengan judul *Sustainable Development Goals Diagnostics: An Application of Network Theory and Complexity Measures to Set Country Priorities*, dilakukan pada 242 negara dengan menggunakan basis data global untuk 423 indikator dengan metode teori jaringan dan kompleksitas ekonomi (*Methods are Network Theory and Economic Complexity*). El-Maghrabi menyebutkan bahwa negara yang berpendapatan rendah dan menengah memiliki korelasi paling kuat dengan indikator SDG tujuan lain: pengurangan kemiskinan, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, kesetaraan gender, kota dan masyarakat yang berkelanjutan, kesehatan.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, *Institute for Global Environmental Strategies* (IGES) menggunakan metode *Social Network Analysis* pada 9 negara untuk 108 target SDG. Ditemukan bahwa target strategis adalah produktivitas pertanian, sanitasi, akses layanan energi, dan NEET (*Not in Education, Employment, or Training*).

Sekretariat SDGs nasional Bappenas juga mengklasifikasikan tujuan SDG ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah *Catalytic* yang seharusnya diimplementasikan dalam jangka pendek dalam pencapaian agenda SDG, tujuan yang termasuk kategori katalis adalah tujuan nomor 6, 7, 9, 12, 14, 15, dan 17. Kategori kedua adalah *Accelerators* pada jangka menengah, tujuan-tujuan yang memiliki pengaruh positif pada tujuan-tujuan lain di waktu yang sama, adapun tujuan yang masuk dalam kategori ini adalah tujuan nomor 3, 4, 5, 8, 11, 13, dan 16. Kategori ketiga adalah tujuan yang dikatakan *End goals*. Tujuan akhir adalah agenda jangka panjang yang akan dicapai ketika sudah tercapai tujuan-tujuan lainnya, diantaranya tujuan nomor 1, 2, dan 10.

Sejalan dengan pengklasifikasian tujuan, Sekretariat SDGs nasional Bappenas juga membuat laporan Roadmap SDGs Indonesia dengan menggunakan *Social Network Analysis*. Analisis ini dilakukan pada 43 target dari 17 tujuan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pendorong utama target SDGs adalah: pendidikan dasar & menengah gratis untuk

semua (4,1), efisiensi energi (7,3), cakupan kesehatan universal (3,8), dan peningkatan energi terbarukan (7,2).

Bab 3

METODOLOGI

3.1 Data

Indikator SDGs global terdiri dari 241 indikator yang disusun oleh tim penyusun indikator global yang disusun oleh *The United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UN-DESA). Sedangkan untuk indikator nasional TPB/ SDGs yang ditetapkan sekretariat SDGs Nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas) untuk Indonesia adalah 319 indikator.

Indikator SDGs diklasifikasikan menurut ketersediaan sumber data di Indonesia. Secara umum, klasifikasi indikator SDGs di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, indikator nasional sebagai proksi terhadap indikator global dan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Penjelasan detail terkait dengan pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nasional yang sesuai dengan Indikator Global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya untuk menjawab metadata indikator global (sebanyak 85 indikator), contoh: Angka Kematian Ibu.
2. Indikator Nasional sebagai proksi Indikator Global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global (sebanyak 165 indikator), contoh: Proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum layak sebagai proksi indikator proporsi penduduk dengan akses terhadap layanan air minum.

3. Indikator Nasional sebagai tambahan Indikator Global adalah indikator nasional yang telah disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan data serta belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia (sebanyak 69 indikator), misalnya: Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif.

Pada kajian ini, tim penyusun melakukan analisis atas 70 indikator dari 13 tujuan SDGs di Kabupaten Cirebon. Hal ini dikarenakan ketidakterdediaan data sehingga menjadi kendala dalam melakukan studi baseline secara menyeluruh (17 tujuan dan 319 indikator). Data yang digunakan dalam studi *baseline* ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker), dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Tiga tujuan yang tidak terdapat dalam kajian ini, yaitu tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, tujuan 14 Ekosistem Lautan, dan tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Tabel 3.1
Daftar Indikator SDGs di Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
1	1	1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.	SUSENAS Kor
2	1	1.4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (B40)	SUSENAS Kor
3	1	1.4	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (B40)	SUSENAS Kor
4	1	1.4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (B40)	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
5	1	1.4	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	SUSENAS Kor
6	1	1.4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor
7	1	1.4	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor
8	1	1.4	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor
9	1	1.4	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	SUSENAS Kor
10	1	1.4	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	SUSENAS Kor
11	2	2.2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	RISKESDAS, PSG
12	2	2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	RISKESDAS, PSG
13	2	2.2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, Wasting	RISKESDAS, PSG
14	2	2.2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, Gemuk	RISKESDAS, PSG
15	3	3.1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
16	3	3.1	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SUSENAS Kor
17	3	3.8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	SUSENAS Kor
18	3	3.8	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	SUSENAS Kor
19	3	3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
20	4	4.1	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SUSENAS Kor
21	4	4.1	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	SUSENAS Kor
22	4	4.1	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat.	SUSENAS Kor
23	4	4.1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
24	4	4.2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SUSENAS Kor
25	4	4.3	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	SUSENAS Kor
26	4	4.3	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	SUSENAS Kor
27	4	4.4	4.4.1*	Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	SUSENAS Kor
28	4	4.4	4.4.1*	Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	SUSENAS Kor
29	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
				perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	
30	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	SUSENAS Kor
31	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat	SUSENAS Kor
32	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SUSENAS Kor
33	4	4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
34	4	4.6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	SUSENAS Kor
35	4	4.6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	SUSENAS Kor
36	5	5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun.	SUSENAS Kor
37	5	5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	SUSENAS Kor
38	5	5.3	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.	SUSENAS Kor
39	5	5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	SUSENAS Kor
40	6	6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SUSENAS Kor
41	6	6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
				terhadap layanan sanitasi layak.	
42	7	7.1	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	SUSENAS Kor
43	8	8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS
44	8	8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS
45	8	8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS, SAKERNAS
46	8	8.3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	SAKERNAS
47	8	8.3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	SAKERNAS
48	8	8.3	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	SAKERNAS
49	8	8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	SAKERNAS
50	8	8.5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	SAKERNAS
51	8	8.5	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	SAKERNAS, SP
52	8	8.6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	SAKERNAS
53	8	8.9	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	SUSENAS Kor
54	9	9.2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	SAKERNAS
55	9	9.c	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	SUSENAS Kor
56	9	9.c	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
57	10	10.1	10.1.1*	Koefisien gini	SUSENAS Kor
58	10	10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.	SUSENAS Kor
59	10	10.2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan.	SUSENAS Kor
60	11	11.1	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	SUSENAS Kor
61	11	11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	DIBI
62	11	11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	DIBI
63	11	11.5	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	DIBI
64	13	13.1	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	DIBI
65	13	13.1	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	DIBI
66	16	16.1	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	SUSENAS Kor
67	16	16.9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	SUSENAS Kor
68	16	16.9	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
				40% berpendapatan bawah.	
69	16	16.9	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	SUSENAS Kor
70	17	17.8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	SUSENAS Kor

3.2 Metadata Indikator SDGs

Dalam mempersiapkan pelaksanaan SDGs, Indonesia telah menyusun metadata sesuai indikator yang akan diukur di tingkat nasional. Dalam penyusunannya, Indonesia melibatkan semua pihak (Pemerintah, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Organisasi Kemasyarakatan) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Selain itu, metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penyusunan tersebut berupa dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang memberikan informasi tentang: konsep dan definisi indikator, metode penghitungan, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, disagregasi, serta frekuensi waktu pengumpulan data. Dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia yang terdiri dari:

- a. Terjemahan Tujuan dan Target
- b. Ringkasan Metadata
- c. Metadata setiap Pilar

Berikut ini adalah metadata¹ dari setiap indikator terpilih untuk kajian ini.

Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Indikator 1.2.1 Penduduk Miskin dengan Garis Kemiskinan Nasional (%)

Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%) atau representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen.

$$P \text{ PM} = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

- P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
JPM : Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu
JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 1.4.1.(a) Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan.

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang

¹ Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas)
<http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen/metadata-indikator/>

pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15-49} \times 100\%$$

Di mana:

- P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
- JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan rendah)
- JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melakukan persalinan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah

Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Di mana:

- P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.
JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Di mana:

- PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

- JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.
- JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(f) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan.

Daerah kumuh adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Persentase rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$P_{RTKP} = \frac{JRTKP}{J RTP} \times 100\%$$

Di mana:

- P RTKP : Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
- JRTKP : Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
- J RTP : Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.

APM SD/ MI/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$APM\ SD = \frac{JMSD}{JP7 - 12} \times 100\%$$

Di mana:

- APM SD : Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat
- JMSD : Jumlah murid tingkat SD/ MI/ sederajat umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$APM\ SMP = \frac{JMSMP}{JP13-15} \times 100\%$$

Di mana:

- APM SMP : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/ MTs/ sederajat

- JMSMP : Jumlah murid tingkat SMP/ MTs/ sederajat umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat.

APM SMA/ MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/ MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$APM\ SMA = \frac{JMSMA}{JP16-18} \times 100\%$$

Di mana:

- APM SMA : Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/MA/ sederajat
- JMSMA : Jumlah murid tingkat SMA/MA/sederajat umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(j) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

$$PKAL = \frac{JPKAL}{JP0-17} \times 100\%$$

Di mana:

- PKAL : Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
- JPKAL : Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JP0-17 : Jumlah penduduk umur 0-17 tahun pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(k) Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Sumber listrik bukan PLN meliputi sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari AKI, generator, PLT surya (solar cell).

$$PSPU = \frac{JRTSPU}{JRTS} \times 100\%$$

Di mana:

- PSPU : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

- JRTSPU : Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
- JRTS : Jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan (penduduk 40% penduduk terbawah/ berpendapatan terendah)

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tandatanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO

$$PKG\ AB(5) = \frac{JAB(5)KG}{JAB(5)} \times 100\%$$

Di mana:

- PKG AB(5) : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
- JAB(5)KG : Jumlah seluruh anak balita yang kekurangan gizi (underweight)
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita

Indikator 2.2.1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita......

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak bawah dua tahun (baduta) dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z*-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : $Z\text{score} < -3,0$
2. Pendek : $Z\text{score} \geq -3,0$ s/d $Z\text{score} < -2,0$

Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(2)P_{\text{stunting}} = \frac{JAB(2)SP_{\text{stunting}}}{JAB(2)} \times 100\%$$

Di mana:

- PAB(2)SP stunting : Prevalensi anak baduta yang menderita pendek dan sangat pendek (stunting)
JAB(2)SP stunting : Jumlah anak baduta pendek dan sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu
JAB(2) : Jumlah anak baduta pada periode waktu yang sama

Indikator 2.2.2. Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe......

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan

pada balita. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/ XII/2010:

- Sangat Kurus : Zscore <-3,0
- Kurus : Zscore \geq - 3,0 s/d Zscore < -2,0

$$\text{PAB(5)KWasting} = \frac{\text{JAB(5)K Wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

- PAB(5)K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus (wasting)
JAB(5) K wasting : Jumlah anak balita yang menderita kurus (wasting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Obesitas (gemuk/sangat gemuk) adalah penyakit kronis dengan ciri-ciri timbunan lemak tubuh yang berlebih (eksesif), biasanya menggunakan ukuran berat badan menurut tinggi badan dibandingkan tinggi badan >2 standar WHO 2005. Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

- Gemuk : Zscore >2, 0 s/d Zscore \leq 3,0
- Obesitas : Zscore >3,0

Tolak ukur kelebihan berat badan adalah \geq 20% dari berat badan ideal, selain itu perlu dilihat dari tinggi badan, bentuk dan besar rangka. Obesitas merupakan indikator risiko terhadap beberapa penyakit dan kematian. Di Indonesia dinilai memakai Indeks Masa Tubuh (IMT), berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Disebut overweight jika nilainya > 27,0.

$$\text{PAB(5)Gemuk} = \frac{\text{JAB(5)Gemuk}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

- PAB(5)Gemuk : Prevalensi anak balita yang menderita gemuk
- JAB(5)Gemuk : Jumlah anak balita yang menderita gemuk pada waktu tertentu
- JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Indikator 3.1.2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

$$P \text{ Salinakes} = \frac{JPMoTK}{JPM15-49} \times 100\%$$

Di mana:

- P Salinakes : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- JPMoTK : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir
- JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir

Indikator 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/ bidan praktek swasta/ praktek dokter, dan puskesmas/ pustu/ polindes.

$$P \text{ Salifaskes} = \frac{JPSalifaskes}{JP15-49} \times 100\%$$

Di mana:

- P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
- JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
- JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun pada periode waktu yang sama

Indikator 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

$$\text{UNPK} = \frac{\text{JPKPK}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

- UNPK : Unmet Need Pelayanan Kesehatan.
 JPKPK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu
 JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 3.8.2 Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%). Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran.

$$\text{Cakupan Jamkes} = \frac{\text{JPJamkes}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

- Cakupan Jamkes : Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
 JPJamkes : Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada waktu tertentu
 JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun (%)

Persentase penduduk berusia di atas 15 tahun dengan kebiasaan merokok didefinisikan dengan perbandingan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang merokok (baik tembakau atau cerutu) setiap hari selama sebulan terakhir dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun keseluruhan yang dinyatakan dalam satuan (%).

$$\%M \geq 15 = \frac{JP \geq 15_y M}{JP \geq 15} \times 100\%$$

Di mana:

- $\%M \geq 15$: Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
 $JP \geq 15M$: Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir pada waktu tertentu
 $JP \geq 15$: Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun pada periode yang sama.

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (7-12 tahun).

$$APK \text{ SD} = \frac{JMSD}{JP7 - 12} \times 100\%$$

Di mana:

- APK SD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
JMSD : Jumlah murid pada SD/MI/sederajat pada periode tertentu.
JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama.

Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat

resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (13-15 tahun).

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13 - 15}} \times 100\%$$

Di mana:

- APK SMP : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
JM SMP : Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu.
JP13-1 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama.

Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (16-18 tahun).

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16 - 18}} \times 100\%$$

Di mana:

- APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.
JM SMA : Jumlah murid SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu.
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.

Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

Di mana:

MYS : *Mean years of schooling* / Rata-rata lama sekolah

P_{15+} : Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun

Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

$$APK \text{ PAUD} = \frac{JMPAUD}{JP3-6} \times 100\%$$

Di mana:

APK PAUD : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

JM PAUD : Jumlah murid PAUD pada periode tertentu.

JP3-6 : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama.

Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di

jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (16-18 tahun).

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16 - 18}} \times 100\%$$

Di mana:

APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

JMSMA : Jumlah murid SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu.

JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.

Indikator 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19-23 tahun).

$$\text{APK PT} = \frac{\text{JMPT}}{\text{JP 19 - 23}} \times 100\%$$

Di mana:

APK PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

JM PT : Jumlah murid pada Perguruan Tinggi (PT) pada periode tertentu

JP 19-23 : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.4.1. Proporsi Remaja Dan Dewasa Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti SmartTV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Berikut ini rumus perhitungan proporsi remaja:

$$PR - TIK = \frac{JRAI}{JR15 - 24}$$

Di mana:

- PR-TIK : Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JRAI : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JR15-24 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama

Sedangkan untuk proporsi dewasa dihitung dengan:

$$PD - TIK = \frac{JDAI}{JD15 - 59}$$

Di mana:

- PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JD15-59: Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama

Indikator 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi

Rasio APM-SD (1) adalah perbandingan antara APM tingkat SD (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki.

$$\text{RAPM SD} = \frac{\text{APM-P SD}}{\text{APM-L SD}} \times 100\%$$

Di mana:

- RAPM SD : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat
- APM-P SD : APM perempuan di tingkat SD/MI/sederajat pada periode tertentu
- APM-L SD : APM laki-laki di tingkat SD/MI/sederajat pada periode yang sama

Rasio APM-SMP (2) adalah perbandingan antara APM tingkat SMP (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki.

$$\text{RAPM SMP} = \frac{\text{APM-P SMP}}{\text{APM-L SMP}} \times 100\%$$

Di mana:

- RAPM SMP : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat
- APM-P SMP : APM perempuan di tingkat SMP/MTs/sederajat pada periode tertentu
- APM-L SMP : APM laki-laki di tingkat SMP/MTs/sederajat pada periode yang sama

Rasio APM SMA (3) adalah perbandingan antara APM tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Ulya dan paket C setara SM) perempuan terhadap APM tingkat menengah laki-laki.

$$\text{RAPM SMA} = \frac{\text{APM-P SMA}}{\text{APM-L SMA}} \times 100\%$$

Di mana:

- RAPM SMA : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat
 APM-P SMA : APM perempuan di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode tertentu
 APM-L SMA : APM laki-laki di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode yang sama

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) (4) perbandingan antara APK tingkat PT perempuan terhadap APK tingkat PT laki-laki.

$$\text{RAPK PT} = \frac{\text{APK-P PT}}{\text{APK-L PT}} \times 100\%$$

Di mana:

- RAPK PT : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di PT
 APK-P PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada PT pada periode tertentu
 APK-L PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki pada PT pada periode yang sama

Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur > 15 tahun

Persentase Angka melek aksara penduduk umur >15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur >15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur >15 tahun.

$$\text{PAMH } 15 - 24 = \frac{\text{JAMH} \geq 15}{\text{JP} \geq 15} \times 100\%$$

Di mana:

- PAMH ≥15 : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun
 JAMH ≥15 : Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu

JP \geq 15 : Jumlah penduduk umur \geq 15 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

AMH penduduk umur 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.

AMH penduduk umur 15-59 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.

$$PAMH\ 15 - 24 = \frac{JAMH\ 15 - 24}{JP\ 15 - 24} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH 15 – 24 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 - 24

JAMH 15 – 24 : Banyaknya penduduk umur 15 – 24 yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15 – 24 : Jumlah penduduk umur 15 – 24 pada periode yang sama

$$PAMH\ 15 - 59 = \frac{JAMH\ 15 - 59}{JP\ 15 - 59} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH 15-59 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59

JAMH 15-59 : Banyaknya penduduk umur 15-59 yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15-59 : Jumlah penduduk umur 15-59 pada periode yang sama

Tujuan 5 Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Perempuan)

Indikator 5.3.1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

$$PHB < 15 = \frac{JPHB < 15}{JP(20-24)} \times 100\%$$

Di mana:

- PHB<15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun
- JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 2-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 15 tahun
- JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

$$PHB < 18 = \frac{JPHB < 18}{JP(20-24)} \times 100\%$$

Di mana:

- PHB<18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun
- JPHB<18 : Jumlah perempuan umur 2-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum 18 tahun
- JP(20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

Indikator 5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (16-18 tahun).

$$APK \text{ SMA} = \frac{JMSMA}{JP16 - 18} \times 100\%$$

Di mana:

APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

JM SMA : Jumlah murid SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu.

JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama.

Indikator 5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

$$P \text{ ITG} = \frac{JITGt}{JPt} \times 100\%$$

Di mana:

P ITG : Individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

JITGt : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode tertentu

JPt : Jumlah penduduk pada periode tertentu

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi (Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua)

Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$P\ AML = \frac{JRTAML}{JRT} \times 100\%$$

Di mana:

- P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
- JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak.
- JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PLSL = \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100\%$$

Di mana:

PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak.

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau (Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua)

Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas melalui jaringan gas rumah tangga terhadap total rumah tangga.

$$RGRT = \frac{RTG}{RT}$$

Di mana:

RGRT : Rasio penggunaan gas rumah tangga

RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas

RT : Total rumah tangga

Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua)

Indikator 8.1.1. Laju pertumbuhan PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

$$\text{Laju PDBpk} = \frac{(\text{PDBpk}_t - \text{PDBpk}_{t-1})}{\text{PDBpk}_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

PDBpk : PDB per kapita

PDBpkt : PDB per kapita pada periode ke t

PDBpkt-1 : PDB per kapita pada periode ke t-1

Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita di peroleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

$$\text{PDBpk} = \frac{\text{PDB ADHB}}{\text{JP}}$$

Di mana:

PDBpk : PDB per kapita

PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku

JP : Jumlah Penduduk

Indikator 8.2.1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

$$LP\ PDB\ ptk = \frac{(PDB\ ptk_t - PDB\ ptk_{t-1})}{PDB\ ptk_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

LP PDB ptk : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

PDB ptk_t : PDB per tenaga kerja pada periode ke t

PDB ptk_{t-1} : PDB per tenaga kerja pada periode ke t-1

Indikator 8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas. Proporsi pekerja informal di sektor non-pertanian dapat di peroleh dengan membagi jumlah penduduk yang bekerja informal di sektor non-pertanian, dengan jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non pertanian dikali 100 persen.

$$P\ LPINP = \frac{PINP}{PTINP} \times 100\%$$

Di mana:

- P LPINP : Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian
PINP : Jumlah Penduduk yang bekerja informal di sektor non Pertanian
PTINP : Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non Pertanian

Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

$$PTKF = \frac{JTKF}{JTK} \times 100\%$$

Di mana:

- P TKF : Persentase tenaga kerja formal
JTKF : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan

status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

$$P TKNIP = \frac{JTKNIP}{JTK} \times 100\%$$

Di mana:

- P TKNIP : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
JTKNIP : Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian
JTK : Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.5.1 Upah rata-rata per jam kerja

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya. Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh tiap jam baik berupa uang maupun barang.

$$\bar{W} = \frac{W}{H \times 4}$$

Di mana:

- \bar{W} : Upah rata-rata per jam kerja
W : Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan
H : Jumlah jam kerja aktual seminggu

Indikator 8.5.2. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Konsep pengangguran yaitu (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Di mana:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka

Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

$$\text{TSP} = \frac{A}{\text{TK}} \times 100\%$$

Di mana:

TSP : Tingkat setengah pengangguran

A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal

TK : Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.6.1 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) diperoleh dengan cara membagi jumlah akumulasi usia muda yang berstatus tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan dengan jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) dikali dengan 100 persen.

$$\text{NEET} = \frac{T(S, B, T)}{\text{Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Di mana:

NEET : *Not in Employment and Not in Education or Training* (tidak sekolah, tidak bekerja, tidak mengikuti training atau pelatihan)

TS : Tidak sekolah

TB : Tidak bekerja
TT : Tidak mengikuti training/pelatihan

Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah jumlah perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk bekerja atau sekolah.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria berikut ini:

- a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi obyek wisata komersial;
- b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;

Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).

Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Indikator 9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan/atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

$$\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTK IM}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Di mana:

TK : Tenaga kerja

IM : Industri manufaktur

JTK IM: Jumlah tenaga kerja industri manufaktur

JTK : Jumlah tenaga kerja

Indikator 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.

$$P \text{ ITG} = \frac{\text{JITG}_t}{\text{JP}_t} \times 100\%$$

Di mana:

P ITG : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

JITG_t : Jumlah individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada periode t

JP_t : Jumlah penduduk pada periode t

Indikator 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman world wide web (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

- P II : Proporsi individu yang menggunakan internet
- P5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet
- JP : Jumlah penduduk

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan (Intra-Dan Antar negara)

Indikator 10.1.1* Koefisien gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apaapa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

$$\text{Koefisien Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Di mana:

- f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1

Fci-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

Indikator 10.2.1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) dibawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

$$PPHM = \frac{JPHM}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita.

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

Tujuan 11 Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas (Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan)

Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 Monitoring Framework, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (durabel housing), kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space), akses air minum (access to improved water), akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) dan keamanan bermukim (security of tenure).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (durabel housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, seng, dan bambu.

- b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/GRC board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu.
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, dan bambu.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindung mencakup pompa/sumur bor, sumur terlindungi dan mata air terlindungi yang berjarak $\geq 10 \text{ m}$ dari penampungan kotoran/ limbah. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum selain 3 jenis di atas (contoh: air kemasan – yang tidak dihitung sebagai akses), maka rumah tangga dapat dikategorikan memiliki akses air minum jika:
- a. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur bor/pompa yang berjarak $< 10 \text{ m}$ dari penampungan limbah/kotoran/ tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan
 - b. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari sumur terlindungi yang berjarak $< 10 \text{ m}$ atau tidak tahu dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, mata air terlindungi dan air hujan
 - c. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari mata

air terlindungi yang berjarak < 10 m dari penampungan limbah/kotoran/tinja, sumber air untuk mandi/cuci

- d. Bagi rumah tangga dengan sumber air minum berasal dari air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding eceran, air sungai dan air lainnya, sumber air untuk mandi/ cuci berasal dari leding meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan
4. Memiliki Akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

$$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100\%$$

Di mana:

PHLT : Proporsi rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau

JRT : Jumlah rumah tangga

Indikator 11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

$$JKM_{SR} = \frac{JKM}{JP} \times 100.000$$

Di mana:

- JKM_{SR} : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang
 JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana
 JP : Jumlah penduduk

$$JKL_{SR} = \frac{JKL}{JP} \times 100.000$$

Di mana:

- JKL_{SR} : Jumlah korban terluka per 100.000 orang
 JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana
 JP : Jumlah penduduk

Indikator 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (IRBI Tahun 2013, BNPB). Kerugian ekonomi langsung akibat bencana adalah penilaian kerugian ekonomi pasca bencana pada berbagai sektor pembangunan (pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor) yang diakibatkan oleh bencana pada sebuah kota.

$$JKE = KEK_1 + KEK_2 + \dots + KEK_n$$

Di mana:

- JKE : Jumlah kerugian ekonomi langsung pada tahun yang sama
 KEK₁ : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota 1
 KEK₂ : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota 2
 KEK_n : Banyaknya kerugian ekonomi langsung pada Kota n

Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya

Indikator 13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana). Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan). Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/ sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

$$JKM_{SR} = \frac{JKM}{JP} \times 100.000$$

Di mana:

JKM_{SR} : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

$$JKL_{SR} = \frac{JKL}{JP} \times 100.000$$

Di mana:

JKL_{SR} : Jumlah korban terluka per 100.000 orang

JKL : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif Di Semua Tingkatan)

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

$$P\text{ PKK} = \frac{J\text{PKK}}{J\text{P}} \times 100\%$$

Di mana:

- P PKK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JPKK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- JP : Jumlah penduduk

Indikator 16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

$$P\text{ BAL} = \frac{J\text{BAK}}{J\text{B}} \times 100\%$$

Di mana:

- P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terdapat menurut umur
- JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran
- JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/ kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi semua penduduk yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

$$P \text{ KALPB} = \frac{\text{JPBAK}}{\text{JPB}} \times 100\%$$

Di mana:

- P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah
JPBAK : Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran
JPB : Jumlah penduduk 40% berpendapatan bawah

Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

$$P \text{ AAK} = \frac{\text{JAAK}}{\text{JA}} \times 100\%$$

Di mana:

P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran

JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun

Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman world wide web (www), surat elektronik (email), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon selular, PDA, perangkat game elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun selular.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

$$P II = \frac{JP5AI}{JP} \times 100\%$$

Di mana:

P II : Proporsi individu yang menggunakan internet

P5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet

JP : Jumlah penduduk

3.3 Metodologi Penelitian

Pemilihan Indikator

Indikator yang sudah dihitung berdasarkan meta data nasional sebanyak 70 indikator. Dari 70 indikator tersebut dipilih 52 Indikator yang nantinya akan dilakukan analisis *interlinkages*. Ada 14 indikator yang tidak digunakan dalam analisis *interlinkages* karena terdapat indikator yang berulang pada beberapa tujuan. Indikator yang berulang tersebut diantaranya APK SMA/ sederajat, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, proporsi individu yang menggunakan internet, akta kelahiran dan proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. Ada pula beberapa indikator yang datanya tidak bervariasi antar kabupaten/kota sehingga tidak dapat digunakan seperti jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Indikator yang digunakan dalam studi *SDGs Interlinkages* adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Daftar Indikator Terpilih untuk Studi SDGs *Interlinkages* di Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
1	1	1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.	SUSENAS Kor
2	1	1.4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (B40)	SUSENAS Kor
3	1	1.4	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	SUSENAS Kor
4	1	1.4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor
5	1	1.4	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
6	1	1.4	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (B40)	SUSENAS Kor
7	1	1.4	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	SUSENAS Kor
8	2	2.2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	RISKESDAS, PSG
9	2	2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	RISKESDAS, PSG
10	2	2.2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, Wasting	RISKESDAS, PSG
11	2	2.2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, Gemuk	RISKESDAS, PSG
12	3	3.1	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	SUSENAS Kor
13	3	3.1	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SUSENAS Kor
14	3	3.8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	SUSENAS Kor
15	3	3.8	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
16	3	3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
17	4	4.1	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	SUSENAS Kor
18	4	4.1	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	SUSENAS Kor
19	4	4.1	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat.	SUSENAS Kor
20	4	4.1	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
21	4	4.2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SUSENAS Kor
22	4	4.3	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	SUSENAS Kor
23	4	4.4	4.4.1*	Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	SUSENAS Kor
24	4	4.4	4.4.1*	Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	SUSENAS Kor
25	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	SUSENAS Kor
26	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	SUSENAS Kor
27	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat	SUSENAS Kor
28	4	4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SUSENAS Kor

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
29	4	4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	SUSENAS Kor
30	4	4.6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	SUSENAS Kor
31	4	4.6	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	SUSENAS Kor
32	5	5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun.	SUSENAS Kor
33	5	5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	SUSENAS Kor
34	6	6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SUSENAS Kor
35	6	6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SUSENAS Kor
36	7	7.1	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	SUSENAS Kor
37	8	8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS
38	8	8.1	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS
39	8	8.2	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS, SAKERNAS
40	8	8.3	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	SAKERNAS
41	8	8.3	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	SAKERNAS

No	Tujuan	Target	Kode	Indikator	Sumber
42	8	8.3	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	SAKERNAS
43	8	8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	SAKERNAS
44	8	8.5	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	SAKERNAS
45	8	8.5	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	SAKERNAS, SP
46	9	9.2	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	SAKERNAS
47	9	9.c	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	SUSENAS Kor
48	10	10.1	10.1.1*	Koefisien gini	SUSENAS Kor
49	10	10.2	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan.	SUSENAS Kor
50	11	11.1	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	SUSENAS Kor
51	16	16.1	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	SUSENAS Kor
52	17	17.8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	SUSENAS Kor

Missing Value Imputation

Data yang digunakan untuk analisis studi SDGs Interlinkages adalah data seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Namun, ada beberapa kabupaten/kota yang datanya tidak tersedia (missing). Untuk mengatasi masalah data yang *missing* maka dilakukan imputasi. Imputasi tersebut dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata dari indikator pada level nasional atau provinsi. Dengan demikian, missing value tersebut diimputisasi dengan nilai rata-rata.

Mengukur Perfoma Indikator SDGs

Berdasarkan metodologi World Bank terkait *Country Development Diagnostics Framework* (CDDF) (Gable et al., 2015). Metodologi ini mengukur performa indikator SDGs berdasarkan kapasitas suatu negara yang diproksi oleh GNI per kapita (dalam penelitian ini menggunakan expenditure per capita dari HDI). Untuk setiap kombinasi daerah dan indikator SDGs, sebuah daerah diklasifikasikan sebagai *over-performer* jika indikator SDGs tersebut secara statistic lebih baik dari ekspektasi performa berdasarkan kapasitas daerah tersebut.

Secara formal, klasifikasi ini diukur menggunakan konsep Revealed Comparative Advantage (RCA). RCA terdiri dari angka biner (0 dan 1) yang menggambarkan keunggulan komparatif dari setiap indikator. Cara untuk mendapatkan RCA adalah sebagai berikut.

$$RCA(i, c) = \begin{cases} 1, & x_{i,c} > Z_{\alpha=0.05} + E(x_{i,c}) \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

Di mana, $RCA(i,c)$ adalah nilai RCA pada individu (i) dan kondisi (c) tertentu yang terdiri dari 1 ketika tingkat kepercayaan statistiknya melebihi 95% dan 0 untuk kondisi lainnya.

Mengukur Proximity

Konsep *proximity* SDGs dikonseptualisasikan dalam kedekatan di antara SDGs. Misalnya, *proximity* atau kedekatan antara dua SDG-indikator A dan B didefinisikan sebagai minimum dua probabilitas kondisional: probabilitas kondisional untuk menemukan A yang diberikan B; dan probabilitas menemukan B yang diberikan A; karena probabilitas bersyarat tidak simetris, seperti pada persamaan berikut.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \neq P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Mengukur *Centrality*

Sentralitas SDG adalah jumlah dari semua perkiraan pasangan *proximity* SDGs. Dengan demikian, ini digunakan sebagai ukuran keterhubungan. Sentralitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu SDGs memiliki kedekatan yang tinggi dengan SDGs yang lainnya. Sebagai contoh, jika suatu daerah berhasil dalam suatu SDGs, kemungkinan akan berhasil di banyak daerah lain.

Mengukur *Density*

Density didefinisikan berdasarkan perkiraan suatu SDGs ke SDGs lain yang telah berhasil dicapai. Dalam konteks jaringan SDGs, kemudahan bagi suatu daerah untuk menjadi *over-perform* bergantung pada: (i) indikator SDGs lain di daerah yang sudah *over-performer*; dan (ii) *proximity* (kedekatan) dari SDGs target dengan masing-masing target lainnya di daerah yang sudah *over-performer*. Secara formal, *density* untuk suatu daerah c pada SDGs j , yang kinerjanya rendah (*under-performer*), adalah jumlah dari perkiraan antara SDGs j dan semua SDGs sukses lainnya, dibagi dengan jumlah semua perkiraan yang mengarah ke SDGs j (diskalakan dengan sentralitasnya):

$$density_{cj} = \frac{\sum_i \varphi_j x_{ci}}{\sum_i \varphi_j}$$

Pemilihan Indikator SDGs Prioritas

- Indikator yang berada dalam jangkauan (*density* tinggi, mencerminkan bahwa daerah ini memiliki sebagian besar kapasitas)
- Indikator yang menawarkan ruang lingkup yang lebih tinggi untuk diversifikasi lebih lanjut (*centrality* tinggi,

mencerminkan bahwa jika daerah mampu mencapai suatu indikator SDGs, kemungkinan besar dapat mencapai indikator SDGs lainnya)

Bab 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

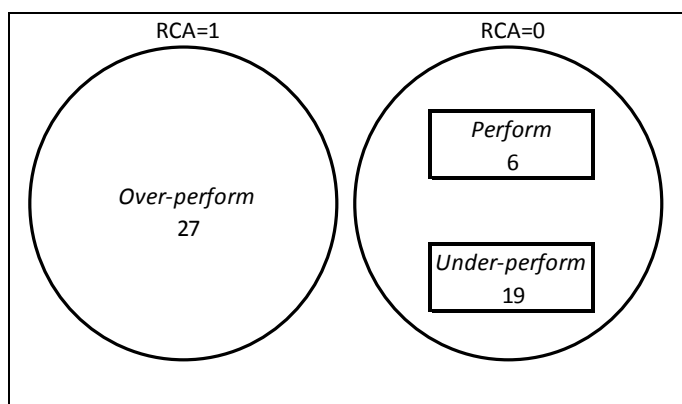
4.1 Performa Indikator SDGs

Performa indikator SDGs dilihat dengan cara mengukur kemajuan SDG dengan mempertimbangkan tingkat kapasitas suatu negara yang diproksi dengan GNI per kapita (El-Maghrabi et al., 2018). Pada studi ini, kami menggunakan pengeluaran per kapita sebagai proksinya karena analisis penelitian berada pada level kabupaten yang tidak memungkinkan GNI per kapita.

Gambar 4.1 memperlihatkan performa dari masing-masing 52 indikator SDGs terhadap pendapatan perkapita. Garis merah merupakan *fitted line* untuk *kernel weighted polynomial smoothing*. Sedangkan daerah yang diarsir merupakan *95% Confidence interval*. Garis merah ini menggambarkan rata-rata pencapaian indikator SDGs untuk setiap tingkat pengeluaran per kapita. Dengan kata lain, garis merah ini menjadi tingkat pencapaian minimal yang diharapkan dari suatu indikator pada setiap tingkat pengeluaran per kapita. Kabupaten-kota di luar daerah yang diarsir secara signifikan memiliki performa yang lebih baik (*overperforming*) atau kurang baik (*underperforming*) dibandingkan daerah-daerah lainnya dengan tingkat pengeluaran per kapita yang sama.

Seluruh kabupaten kota di Indonesia diplot dalam gambar tersebut, dan secara khusus Kabupaten Cirebon ditandai dengan titik warna biru untuk memudahkan kita melihat posisi Kabupaten Cirebon di dalam plot. Sedangkan Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Barat di beri tanda titik merah. Regresi polynomial memberikan petunjuk pada kita untuk penentuan RCA (*revealed comparative advantage*) untuk setiap indikator di setiap daerah. RCA yang bernilai 1 menunjukkan bahwa indikator tersebut relatif berhasil dibandingkan daerah lain yang memiliki kapasitas yang relatif sama atau dengan kata lain memiliki keunggulan komparatif.

Berdasarkan hasil pengelompokkan, Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dibandingkan daerah lainnya dengan tingkat pendapatan yang sama untuk 27 indikator (Lihat Tabel 4.1). Indikator-indikator SDGs tersebut termasuk ke dalam kelompok *over-performing* yaitu indikator SDGs di Kabupaten Cirebon yang memiliki performa secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian di kabupaten/kota lain yang memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Namun tidak demikian untuk 25 indikator SDGs lainnya (RCA=0). Dari 25 indikator tersebut, Kabupaten Cirebon memiliki 6 indikator yang mengalami performa yang cukup baik (*performing*), dan terdapat 19 indikator yang mengalami tingkat pencapaiannya lebih rendah dari ekspektasi (*under-performing*) pencapaian indikator tersebut untuk kapasitas yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon. Gambar berikut memetakan jumlah indikator SDGs ke dalam tiga kelompok yaitu, *over-performing*, *performing*, dan *under-performing*.



Gambar 4.1
Ilustrasi Pengelompokkan Performa

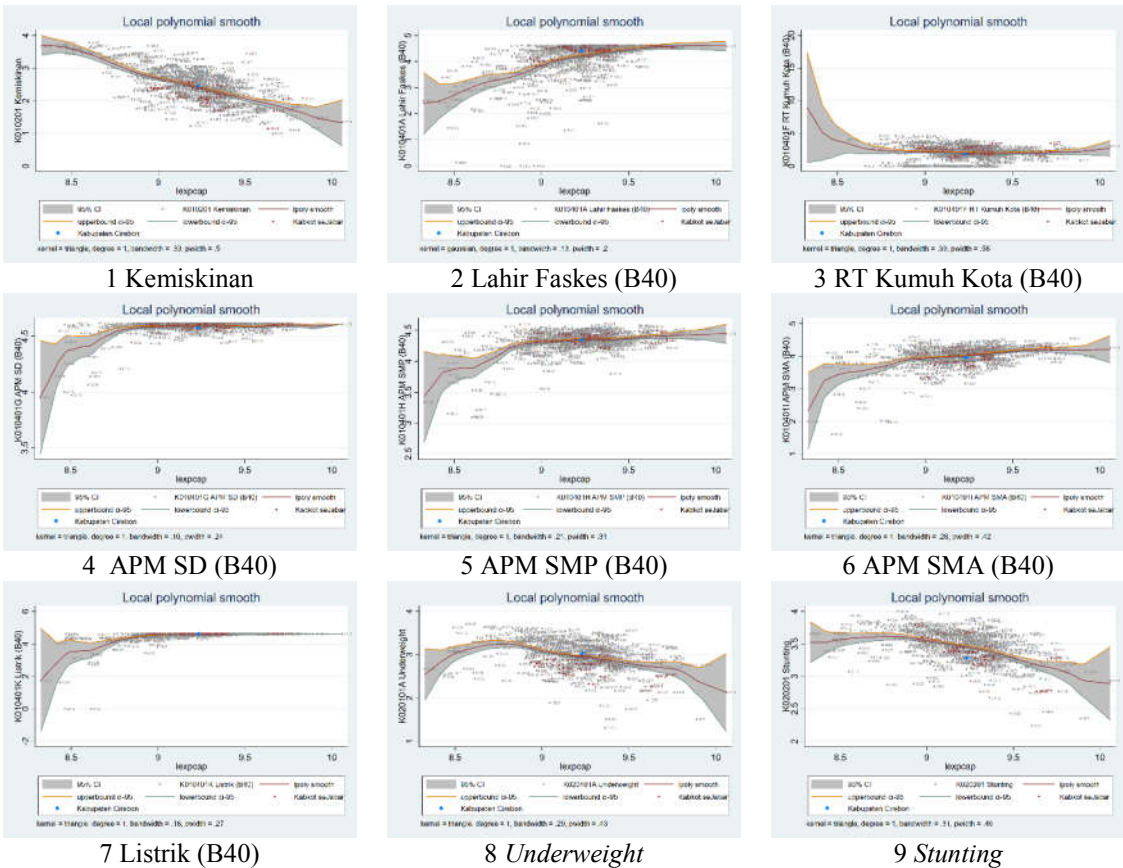
Tabel 4.1
Indikator *Over-Performing* di Kabupaten Cirebon

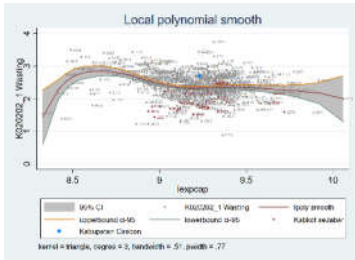
Tujuan	Indikator	Performa
1	Kemiskinan	<i>Over-perform</i>
	Lahir Faskes (B40)	<i>Over-perform</i>
	RT Kumuh Kota (B40)	<i>Over-perform</i>
	APM SD (B40)	<i>Perform</i>
	APM SMP (B40)	<i>Under-perform</i>
	APM SMA (B40)	<i>Under-perform</i>
	Listrik (B40)	<i>Under-perform</i>
2	<i>Underweight</i>	<i>Over-perform</i>
	<i>Stunting</i>	<i>Over-perform</i>
	<i>Wasting</i>	<i>Under-perform</i>
	Gemuk	<i>Under-perform</i>
3	Lahir Tenkes	<i>Over-perform</i>
	Lahir Faskes	<i>Over-perform</i>
	Unmet need kesehatan	<i>Over-perform</i>
	Asuransi	<i>Perform</i>
	Merokok	<i>Under-perform</i>
4	APK SD	<i>Over-perform</i>
	APK SMP	<i>Over-perform</i>
	APK SMA	<i>Over-perform</i>
	Rata2 Lama Sekolah	<i>Over-perform</i>
	APK PAUD	<i>Over-perform</i>
	APK PT	<i>Over-perform</i>
	Remaja TIK	<i>Over-perform</i>
	Dewasa TIK	<i>Over-perform</i>
	APM SD (P/L)	<i>Perform</i>
	APM SMP (P/L)	<i>Perform</i>
	APM SMA (P/L)	<i>Under-perform</i>
	APK PT (P/L)	<i>Under-perform</i>
	Melek Huruf >= 15	<i>Under-perform</i>
	Melek Huruf 15-24	<i>Under-perform</i>
Melek Huruf 15-59	<i>Under-perform</i>	
5	Kawin <15	<i>Over-perform</i>
	Kawin <18	<i>Over-perform</i>
6	Air Minum Layak	<i>Over-perform</i>
	Sanitasi Layak	<i>Over-perform</i>
7	Gas RT	<i>Over-perform</i>
8	Laju PDB per kap.	<i>Over-perform</i>
	PDB per kap.	<i>Over-perform</i>
	PDB riil per org bekerja	<i>Over-perform</i>
	Informal non-pertanian (%)	<i>Perform</i>
	TK Formal (%)	<i>Perform</i>
	Informal Pertanian (%)	<i>Under-perform</i>
	Upah Rata2	<i>Under-perform</i>

Tujuan	Indikator	Performa
9	Pengangguran Terbuka	<i>Under-perform</i>
	Setengah Pengangguran	<i>Under-perform</i>
10	TK Manufaktur	<i>Over-perform</i>
	HP	<i>Under-perform</i>
11	Gini	<i>Under-perform</i>
	< 50% med. Pendapatan	<i>Under-perform</i>
16	Hunian Layak	<i>Over-perform</i>
17	Korban kekerasan	<i>Under-perform</i>
	Internet	<i>Over-perform</i>

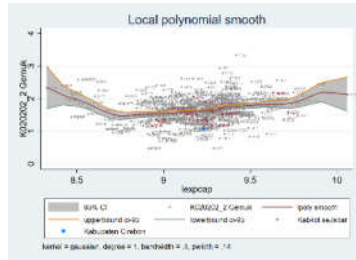
Sumber: Hasil pengolahan

Gambar 4.2
Performa dari indikator SDGs terhadap pendapatan perkapita

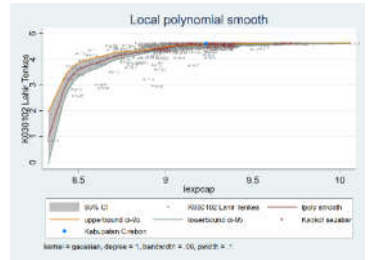




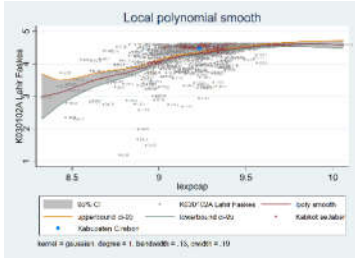
10 Wasting



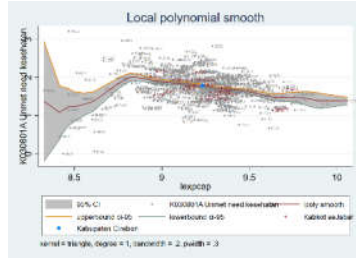
11 Gemuk



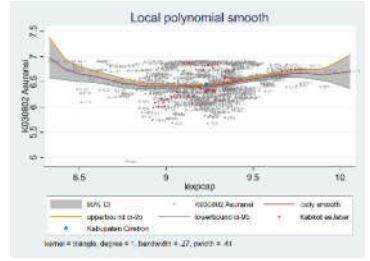
12 Lahir Tenkes



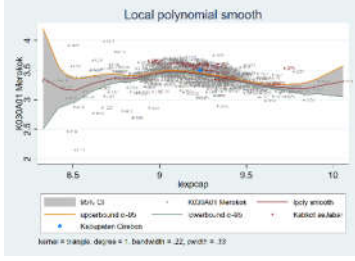
13 Lahir Faskes



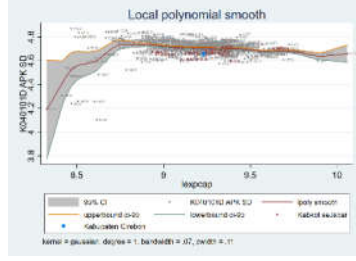
14 Unmet need kesehatan



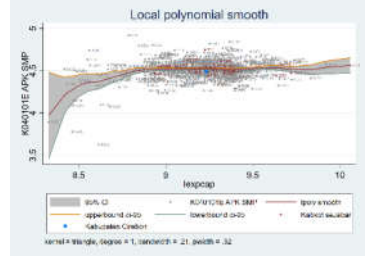
15 Asuransi



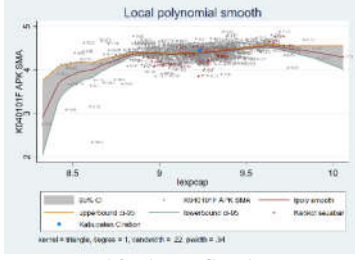
16 Merokok



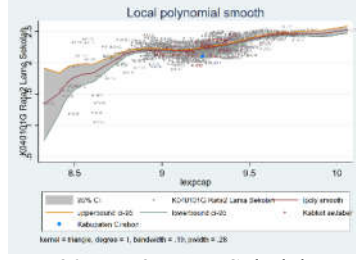
17 APK SD



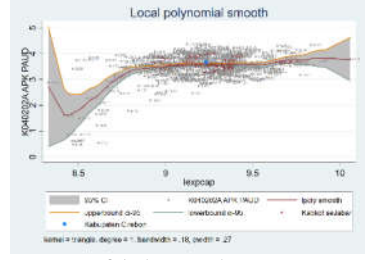
18 APK SMP



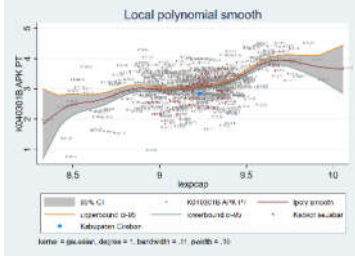
19 APK SMA



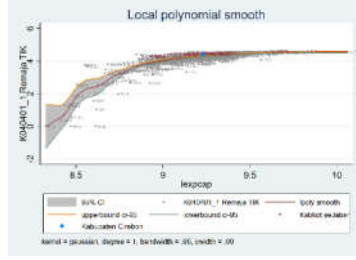
20 Rata2 Lama Sekolah



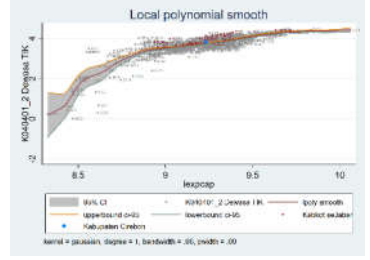
21 APK PAUD



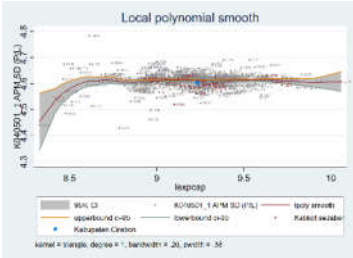
22 APK PT



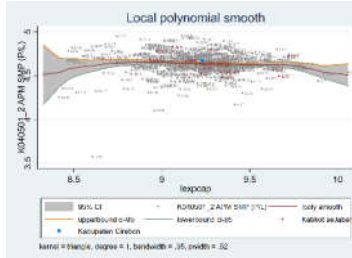
23 Remaja TIK



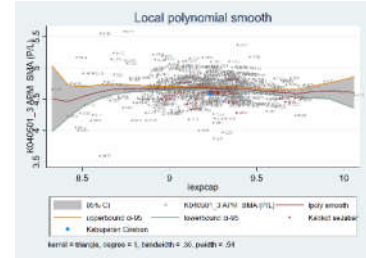
24 Dewasa TIK



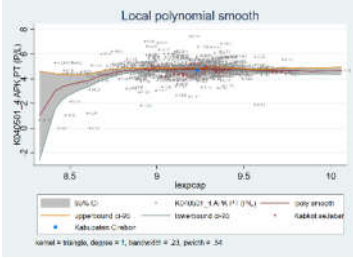
25 APM SD (P/L)



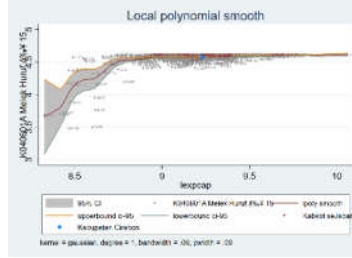
26 APM SMP (P/L)



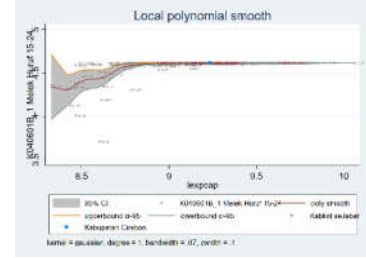
27 APM SMA (P/L)



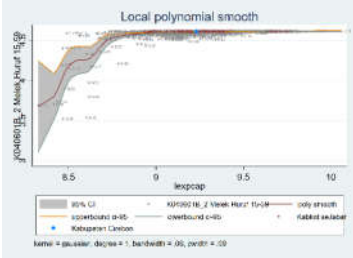
28 APK PT (P/L)



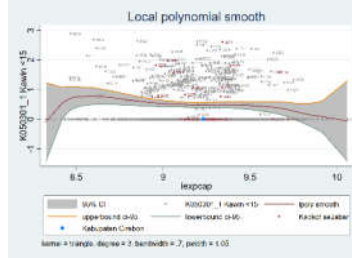
29 Melek Huruf >= 15



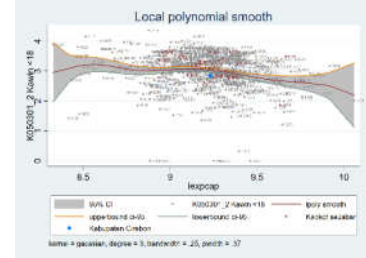
30 Melek Huruf 15-24



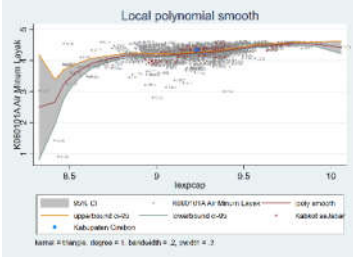
31 Melek Huruf 15-59



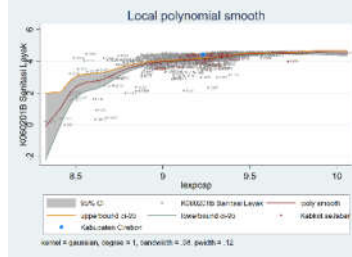
32 Kawin <15



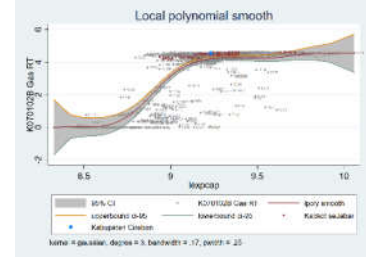
33 Kawin <18



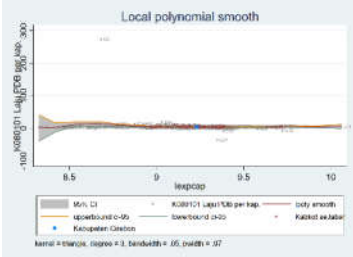
34 Air Minum Layak



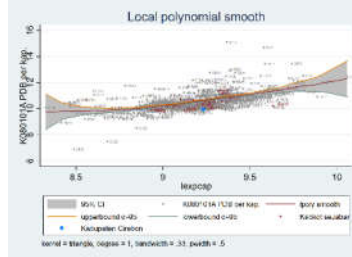
35 Sanitasi Layak



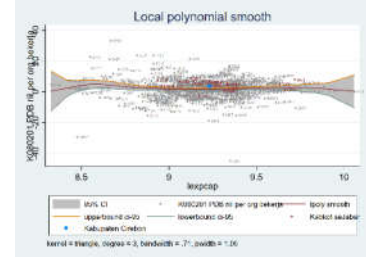
36 Gas RT



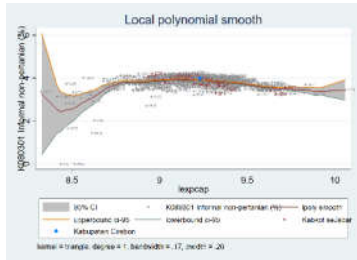
37 Laju PDB per kap.



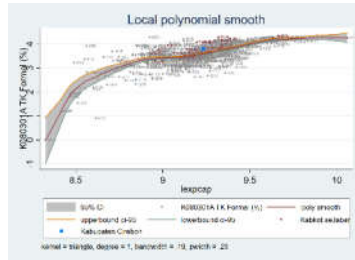
38 PDB per kap



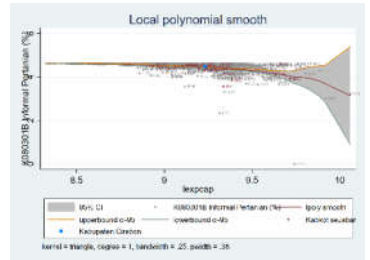
39 PDB rii per org bekerja



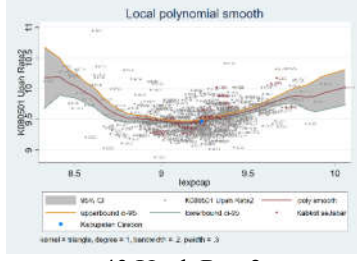
40 Informal non-pertanian (%)



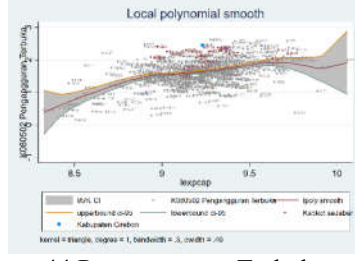
41 TK Formal (%)



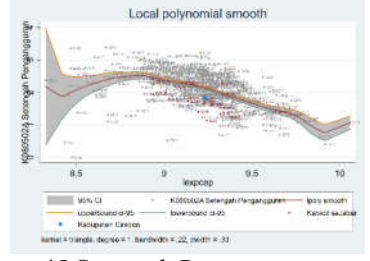
42 Informal Pertanian (%)



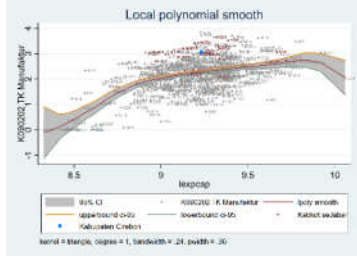
43 Upah Rata2



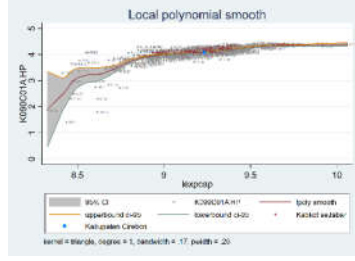
44 Pengangguran Terbuka



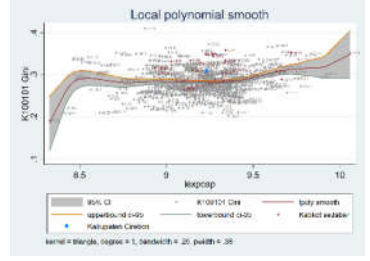
45 Setengah Pengangguran



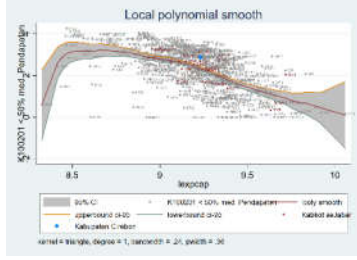
46 TK Manufaktur



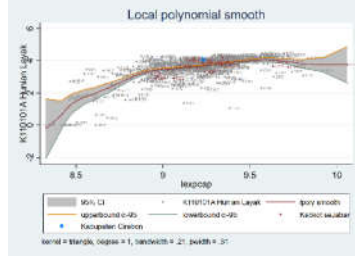
47 HP



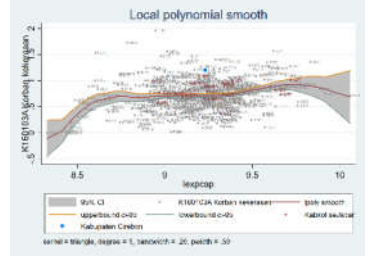
48 Gini



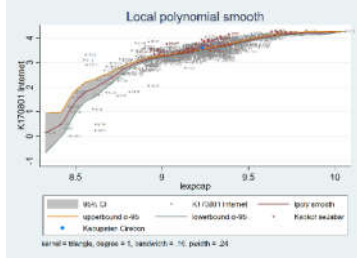
49 <50% med. Pendapatan



50 Hunian Layak



51 Korban Kekerasan



52 Internet

Sumber: Hasil pengolahan

4.2 Proximity

Kapasitas untuk pencapaian indikator SDGs tergantung pada *proximity* atau kedekatan indikator SDGs dengan indikator SDGs lainnya. Kedekatan antara dua SDG-indikator A dan B didefinisikan sebagai minimum dua probabilitas kondisional: probabilitas kondisional untuk menemukan A yang diberikan B; dan probabilitas menemukan B yang diberikan A; karena probabilitas bersyarat tidak simetris. Gambar 4.3 menunjukkan matriks *proximity* dari indikator-indikator yang dihitung dalam penelitian ini. Nilai *proximity* yang tinggi antara dua indikator SDGs menunjukkan bahwa pencapaian kedua indikator tersebut memerlukan kapasitas yang relatif sama. Proximity antara dua indikator ini juga menunjukkan tingkat kemudahan dari kapasitas yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat digunakan secara bersama-sama untuk pencapaian kedua indikator SDGs tersebut.

Gambar 4.3
Matriks Proximity Indikator SDGs

The image displays a large matrix of proximity values between various Sustainable Development Goals (SDGs) and their indicators. The matrix is color-coded, with red indicating high proximity and blue indicating low proximity. The indicators are listed along the top and left sides of the matrix. The matrix is symmetric, with the diagonal elements representing the proximity of each indicator to itself, which is 1.0. The values range from 0.0 to 1.0, with higher values indicating a stronger relationship between the indicators. The matrix is organized into a grid with 17 columns and 17 rows, each representing a different SDG indicator. The indicators are: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00.

4.3 Centrality

Sentralitas SDG adalah jumlah dari semua perkiraan pasangan SDG. Dengan demikian, sentralitas digunakan sebagai ukuran keterhubungan. Sentralitas yang tinggi menunjukkan bahwa indikator SDG tersebut memiliki banyak SDG yang berdekatan. Tabel 4.2 memperlihatkan nilai sentralitas yang diurutkan dari nilai sentralitas tertinggi sampai sentralitas terendah.

Tabel 4.2
Centrality dari Indikator SDGs

Tujuan	Indikator	Centrality	Rank
1	Kemiskinan	20.617	35
	Lahir Faskes (B40)	24.722	5
	RT Kumuh Kota (B40)	19.198	43
	APM SD (B40)	22.849	21
	APM SMP (B40)	23.507	14
	APM SMA (B40)	23.720	13
	Listrik (B40)	24.860	3
2	Underweight	20.608	36
	Stunting	21.244	33
	Wasting	20.412	38
	Gemuk	20.259	39
3	Lahir Tenkes	24.894	2
	Lahir Faskes	24.855	4
	Unmet need kesehatan	21.794	27
	Asuransi	21.267	32
	Merokok	19.469	42
4	APK SD	19.800	40
	APK SMP	21.862	26
	APK SMA	22.868	20
	Rata2 Lama Sekolah	22.702	23
	APK PAUD	21.530	31
	APK PT	22.280	24
	Remaja TIK	24.980	1
	Dewasa TIK	24.524	6
	APM SD (P/L)	22.774	22
	APM SMP (P/L)	16.544	48
	APM SMA (P/L)	12.093	51
	APK PT (P/L)	12.041	52
	Melek Huruf 15	23.021	19
	Melek Huruf 15-24	23.895	11
Melek Huruf 15-59	23.731	12	

Tujuan	Indikator	Centrality	Rank
5	Kawin <15	23.144	18
	Kawin <18	18.896	45
6	Air Minum Layak	23.308	17
	Sanitasi Layak	24.417	7
7	Gas RT	24.222	9
8	Laju PDB per kap.	12.978	50
	PDB per kap.	17.793	47
	PDB riil per org bekerja	21.622	29
	Informal non-pertanian (%)	19.562	41
	TK Formal (%)	23.359	16
	Informal Pertanian (%)	14.321	49
	Upah Rata2	18.511	46
	Pengangguran Terbuka Setengah Pengangguran	19.050 21.663	44 28
9	TK Manufaktur	22.039	25
	HP	23.475	15
10	Gini	20.773	34
	< 50% med. Pendapatan	20.427	37
11	Hunian Layak	24.402	8
16	Korban kekerasan	21.580	30
17	Internet	23.927	10

Sumber: Hasil Pengolahan

Tiga indikator SDGs yang memiliki sentralitas tertinggi adalah indikator remaja TIK, indikator melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan dan akses listrik untuk populasi rentan (bottom 40).

4.4 Density

Density menjadi pembeda untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Jika sentralitas berlaku umum untuk setiap kabupaten-kota di Indonesia, ukuran density bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota. Tabel 4.5 menunjukkan nilai density dari masing-masing indikator yang dihitung untuk Kabupaten Cirebon.

Tabel 4.3
Density Kabupaten Cirebon

Tujuan	Indikator	Density	Rank
1	Kemiskinan	0.529	41
	Lahir Faskes (B40)	0.583	2
	RT Kumuh Kota (B40)	0.545	31
	APM SD (B40)	0.569	9
	APM SMP (B40)	0.556	21
	APM SMA (B40)	0.562	13
	Listrik (B40)	0.577	3
2	Underweight	0.547	28
	Stunting	0.537	37
	Wasting	0.556	20
	Gemuk	0.540	35
3	Lahir Tenkes	0.577	4
	Lahir Faskes	0.583	1
	Unmet need kesehatan	0.544	33
	Asuransi	0.527	44
	Merokok	0.562	14
4	APK SD	0.543	34
	APK SMP	0.550	25
	APK SMA	0.532	39
	Rata2 Lama Sekolah	0.537	36
	APK PAUD	0.561	15
	APK PT	0.560	17
	Remaja TIK	0.572	8
	Dewasa TIK	0.561	16
	APM SD (P/L)	0.546	30
	APM SMP (P/L)	0.525	47
	APM SMA (P/L)	0.510	49
	APK PT (P/L)	0.534	38
	Melek Huruf >= 15	0.550	24
	Melek Huruf 15-24	0.551	22
	Melek Huruf 15-59	0.529	42
5	Kawin <15	0.550	23
	Kawin <18	0.528	43
6	Air Minum Layak	0.568	11
	Sanitasi Layak	0.569	10
7	Gas RT	0.563	12
8	Laju PDB per kap.	0.575	6
	PDB per kap.	0.509	50
	PDB riil per org bekerja	0.548	26
	Informal non-pertanian (%)	0.526	45
	TK Formal (%)	0.531	40
	Informal Pertanian (%)	0.525	46
	Upah Rata2	0.505	51

Tujuan	Indikator	Density	Rank
	Pengangguran Terbuka	0.547	29
	Setengah Pengangguran	0.548	27
9	TK Manufaktur	0.576	5
	HP	0.557	19
10	Gini	0.515	48
	< 50% med. Pendapatan	0.501	52
11	Hunian Layak	0.573	7
16	Korban kekerasan	0.545	32
17	Internet	0.559	18

Sumber: Hasil Pengolahan

Bab 5

REKOMENDASI INDIKATOR PRIORITAS

Bagian ini menjelaskan mengenai analisis pemilihan indikator prioritas dalam rangka pencapaian SDGs di Kabupaten Cirebon. Secara khusus analisis diarahkan dalam rangka pencapaian indikator prevalensi stunting di Kab. Cirebon. Saat ini penanganan *stunting* mendapatkan perhatian khusus secara nasional, termasuk juga di Kab. Cirebon. Hal ini tidak terlepas dari dampak stunting yang cukup signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila tidak segera ditangani ketika masih kecil, stunting dapat memberikan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Konsekuensi jangka pendek yaitu kerentanan yang lebih besar terhadap infeksi seperti diare dan pneumonia karena kekebalan tubuh yang lemah (Rakotomanana, Gates, Hildebrand, & Stoecker, 2017). Stunting juga berdampak kepada kelainan patologis yang terkait dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, hilangnya potensi pertumbuhan fisik, penurunan fungsi perkembangan saraf dan kognitif serta peningkatan risiko penyakit kronis pada masa dewasa. Di sisi lain, saat ini pemerintah juga mengeluarkan berbagai program dan kegiatan dengan fokus intervensi penurunan *stunting*. Oleh karena itu, pemilihan indikator prioritas dalam buku ini juga sebagai bagian dari kontribusi akademisi dalam pencapaian SDGs, khususnya indikator prevalensi *stunting*.

5.1 Visualisasi Network SDGs Interlinkages

Gambar 5.1 berikut menunjukkan visualisasi dari network indikator-indikator SDGs di Kabupaten Cirebon. Visualisasi network ini dibangun berdasarkan nilai proximity antar dua indikator, mengikuti metode yang digunakan oleh Hidalgo dkk (2007). Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kerangka network yang dibangun berdasarkan algoritma *maximum spanning tree*. Algoritma ini akan membuat kerangka network yang menghubungkan setiap indikator dengan indikator yang paling dekat atau yang memiliki keterhubungan yang paling kuat. Setelah kerangka

network terbentuk, langkah selanjutnya adalah menambahkan koneksi lainnya ke dalam kerangka tersebut. Koneksi yang ditambahkan adalah yang memiliki nilai *proximity* lebih dari 0.4 (rentang *proximity* pada studi ini 0.000 – 0.691).

Pada Gambar 5.1, garis warna abu-abu dan hijau menunjukkan nilai *proximity* di atas 0.4. Namun untuk garis warna hijau khusus untuk menunjukkan keterhubungan dengan indikator *stunting*. Selanjutnya, warna bulatan hijau, kuning dan merah masing-masing menunjukkan indikator yang *over-performing*, *performing* dan *under-performing*. Ukuran bulatan menunjukkan nilai *density* dari setiap indikator.

Gambar tersebut menunjukkan pola *core-periphery*, dimana indikator terkait kesehatan, pendidikan, energi dan ketenagakerjaan menempati network yang cukup padat di tengah-tengah. Koneksi listrik dan gas, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, air dan sanitasi yang layak, Tenaga kerja formal, pendidikan dasar dan pelayanan publik dasar merupakan indikator-indikator yang berada di pusat network. Indikator-indikator ini merepresentasikan kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi ketercapaian indikator-indikator lainnya di network tersebut. Selanjutnya indikator-indikator terkait penggunaan internet, handphone dan TIK secara umum juga menjadi salah satu *gatekeeper*. Indikator *gatekeeper* ini merepresentasikan indikator yang menghubungkan satu kelompok indikator dengan kelompok indikator yang lainnya. Ketiga indikator terkait TIK ini sejalan dengan teori institusional ekonomi dimana memfasilitasi pertukaran informasi dengan baik dapat meningkatkan transformasi politik dan ekonomi di masyarakat, yang salah satunya dapat menurunkan biaya transaksi, dan mengurangi informasi yang asimetris (Coase, 1998).

threshold 0.4 (lihat garis hijau pada Gambar 5.1) dan memiliki keterkaitan langsung dengan indikator *stunting*. Dari 52 indikator yang dianalisis, terdapat 34 indikator yang memenuhi kriteria ini. Diantara 34 indikator tersebut, indikator *underweight* dan *wasting* memiliki nilai *proximity* yang paling tinggi, yaitu 0.691 dan 0.502. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi *underweigh* dan *wasting* memiliki kedekatan yang cukup baik dengan *stunting*. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh Kab. Cirebon relatif mudah untuk digunakan untuk pencapaian ketiga indikator tersebut secara bersama-sama.

Tabel 5.1
Indikator Prioritas Penanganan *Stunting* di Kabupaten Cirebon

Indikator	Ranking		
	Proximity to Stunting	Centrality	Density
Lahir Faskes	17	4	1
Lahir Faskes (B40)	14	5	2
Listrik (B40)	12	3	3
Lahir Tenkes	8	2	4
Hunian Layak	9	8	7
Remaja TIK	2	1	8
Sanitasi Layak	19	7	10

Sumber: Hasil pengolahan

Seleksi berikutnya dilakukan dengan memilih sejumlah indikator yang memiliki nilai *centrality* dan *density* yang paling tinggi diantara 34 indikator yang sudah terseleksi. Seleksi dilakukan dengan memilih indikator yang termasuk 10 terbaik *centrality* dan juga 10 terbaik *density*. Berdasarkan seleksi ini, terpilih 7 indikator yang dapat dijadikan sebagai indikator prioritas penanganan *stunting* di Kab. Cirebon (lihat Tabel 5.1).

Ketujuh indikator prioritas tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, indikator terkait fasilitas dan layanan kesehatan yaitu persentase yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan (bottom 40%). Kelompok berikutnya terkait dengan akses fasilitas dasar

dan perumahan, termasuk didalamnya indikator hunian layak, akses terhadap sanitasi layak dan akses terhadap listrik khususnya untuk kelompok miskin dan rentan. Di sisi lain, percepatan penanganan stunting juga bisa dilakukan dengan peningkatan akses terhadap informasi yang diwakili oleh indikator proporsi remaja yang memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketujuh indikator tersebut selain memiliki *centrality* yang tinggi juga memiliki tingkat *density* yang kuat. *Centrality* yang tinggi menandakan ketujuh indikator tersebut memiliki keterhubungan yang tinggi dengan indikator-indikator yang lain dalam *network*. Pencapaian indikator dengan centralitas yang tinggi dapat berkontribusi pada indikator-indikator lain yang terhubung. Di sisi lain ketujuh indikator tersebut memiliki *density* yang kuat, yang berarti indikator-indikator tersebut berada dalam jangkauan atau dengan kata lain Kab. Cirebon memiliki sebagian kapasitas yang diperlukan untuk penyelesaian ketujuh indikator tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018a). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467.
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018b). Prioritising SDG targets: Assessing baselines, gaps and interlinkages. *Sustainability Science*, 14(2), 421–438.
- Blanc, D. Le. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. DESA Working Paper No. 141.
- El-Maghrabi, M. H., Gable, S., Rodarte, I. O., & Verbeek, J. (2018). *Sustainable development goals diagnostics: an application of network theory and complexity measures to set country priorities*. The World Bank.
- Hidalgo, César A., and others (2007). The product space conditions the development of nations. *Science*, vol. 317, No. 5837, pp. 482-487.
- ODI. (2015). *Projecting Progress: Reaching the SDGs by 2030*.
- Rakotomanana, H., Gates, G. E., Hildebrand, D., & Stoecker, B. J. (2017). Determinants of stunting in children under 5 years in Madagascar. *Maternal and Child Nutrition*, 13(4). <https://doi.org/10.1111/mcn.12409>
- Sachs, D. J. (2012). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Sekretariat SDGs Indonesia. (2017). *Metadata Indikator TPB/ SDGs*

Indonesia. Bappenas.

UN (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

UNESCAP. (2016). *Asia-Pacific Countries With Special Needs Development Report 2016*. United Nations.

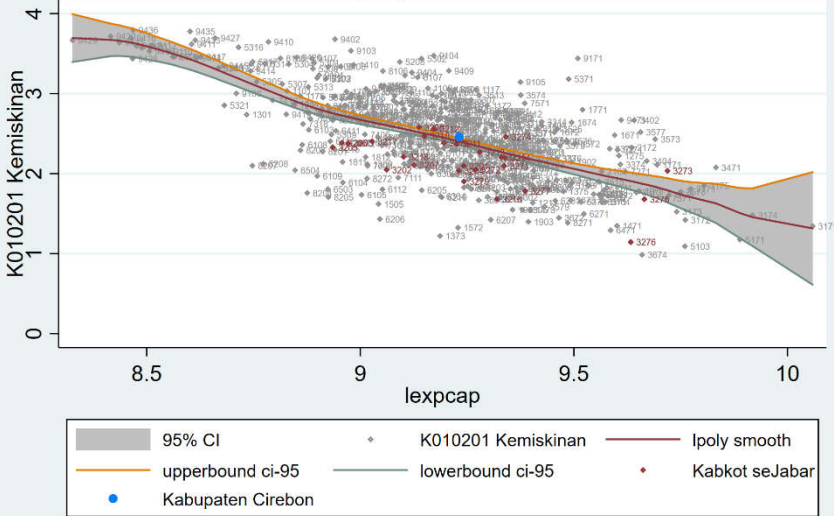
Zhou, X. & Moinuddin, M. (2017). Sustainable Development Goals Interlinkages and Network Analysis: A practical tool for SDG integration and policy coherence. IGES Research Report No. RR1602. Institute for Global Environmental Strategies (IGES).

LAMPIRAN

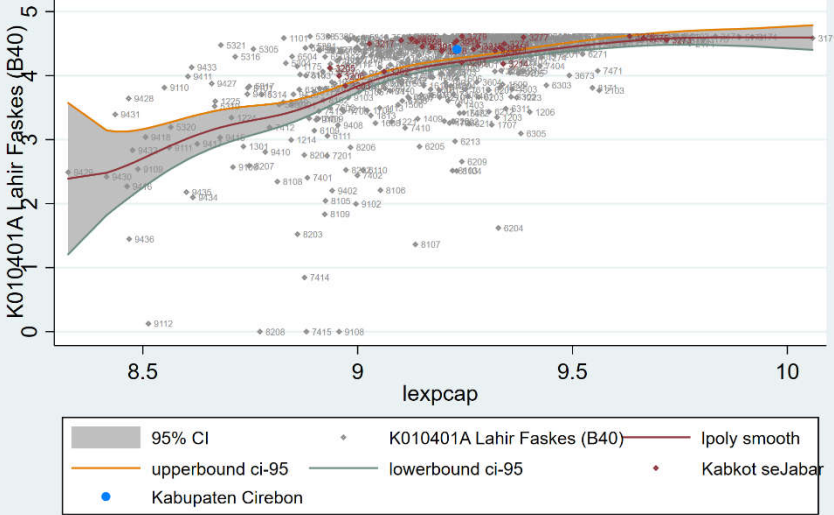
Matris Koprimitas

	pr01	pr02	pr03	pr04	pr05	pr06	pr07	pr08	pr09	pr10	pr11	pr12	pr13	pr14	pr15	pr16	pr17	pr18	pr19	pr20	pr21	pr22	pr23	pr24	pr25	pr26	pr27	pr28	pr29	pr30	pr31	pr32	pr33	pr34	pr35	pr36	pr37	pr38	pr39	pr40	pr41	pr42	pr43	pr44	pr45	pr46	pr47	pr48	pr49	pr50	pr51	pr52
pr01	0.41	0.19	0.41	0.39	0.37	0.43	0.42	0.37	0.43	0.36	0.38	0.39	0.43	0.33	0.38	0.38	0.29	0.38	0.40	0.39	0.40	0.40	0.49	0.42	0.34	0.32	0.22	0.46	0.46	0.40	0.34	0.40	0.39	0.44	0.21	0.40	0.38	0.43	0.46	0.33	0.47	0.38	0.41	0.40	0.54	0.47	0.57	0.40	0.48	0.50		
pr02	0.41	-	0.45	0.56	0.53	0.56	0.73	0.45	0.46	0.48	0.47	0.81	0.92	0.47	0.49	0.42	0.40	0.49	0.50	0.42	0.52	0.48	0.64	0.56	0.57	0.31	0.24	0.25	0.48	0.60	0.54	0.57	0.39	0.57	0.63	0.65	0.30	0.30	0.51	0.33	0.44	0.24	0.30	0.44	0.49	0.55	0.46	0.42	0.36	0.61	0.49	0.53
pr03	0.39	0.45	-	0.37	0.41	0.37	0.41	0.38	0.45	0.38	0.38	0.44	0.44	0.37	0.32	0.43	0.32	0.38	0.36	0.29	0.48	0.33	0.47	0.41	0.36	0.32	0.18	0.23	0.28	0.37	0.32	0.39	0.39	0.44	0.45	0.42	0.29	0.34	0.40	0.35	0.36	0.20	0.29	0.43	0.45	0.44	0.35	0.37	0.41	0.46	0.44	0.41
pr04	0.41	0.56	0.37	-	0.54	0.53	0.61	0.39	0.40	0.38	0.46	0.55	0.55	0.39	0.41	0.37	0.58	0.40	0.47	0.44	0.43	0.44	0.46	0.47	0.67	0.33	0.23	0.25	0.61	0.66	0.65	0.62	0.39	0.40	0.51	0.64	0.38	0.33	0.49	0.34	0.44	0.29	0.33	0.42	0.35	0.42	0.44	0.51	0.42	0.47	0.47	0.40
pr05	0.39	0.53	0.41	0.54	-	0.63	0.59	0.47	0.50	0.45	0.41	0.57	0.54	0.50	0.44	0.44	0.37	0.60	0.51	0.51	0.46	0.48	0.56	0.49	0.48	0.38	0.22	0.25	0.55	0.49	0.51	0.41	0.47	0.54	0.50	0.24	0.35	0.47	0.38	0.46	0.26	0.34	0.41	0.45	0.51	0.49	0.51	0.44	0.51	0.49		
pr06	0.37	0.56	0.37	0.53	0.62	-	0.58	0.45	0.47	0.41	0.41	0.60	0.55	0.47	0.47	0.42	0.40	0.51	0.63	0.59	0.47	0.52	0.55	0.50	0.37	0.23	0.25	0.55	0.56	0.55	0.54	0.43	0.51	0.57	0.50	0.25	0.37	0.43	0.35	0.45	0.25	0.37	0.42	0.40	0.46	0.51	0.48	0.44	0.58	0.48	0.45	
pr07	0.43	0.73	0.41	0.61	0.59	0.58	-	0.43	0.46	0.47	0.47	0.69	0.69	0.43	0.45	0.39	0.40	0.49	0.50	0.46	0.48	0.48	0.65	0.56	0.59	0.33	0.26	0.23	0.54	0.69	0.60	0.60	0.38	0.55	0.61	0.72	0.29	0.31	0.52	0.35	0.49	0.26	0.33	0.39	0.50	0.47	0.51	0.41	0.35	0.61	0.48	0.55
pr08	0.42	0.45	0.38	0.39	0.47	0.45	0.43	-	0.69	0.67	0.34	0.47	0.46	0.48	0.39	0.33	0.33	0.45	0.39	0.34	0.39	0.37	0.49	0.45	0.39	0.33	0.27	0.21	0.42	0.44	0.44	0.42	0.31	0.37	0.38	0.42	0.28	0.34	0.43	0.35	0.35	0.27	0.36	0.44	0.49	0.40	0.45	0.36	0.41	0.41	0.40	0.43
pr09	0.47	0.46	0.45	0.40	0.50	0.47	0.46	0.69	-	0.50	0.40	0.47	0.46	0.50	0.42	0.35	0.36	0.45	0.41	0.38	0.44	0.37	0.51	0.47	0.40	0.32	0.29	0.23	0.41	0.46	0.45	0.44	0.37	0.42	0.45	0.44	0.30	0.36	0.42	0.33	0.41	0.26	0.31	0.41	0.48	0.48	0.42	0.38	0.37	0.47	0.40	0.46
pr10	0.43	0.48	0.38	0.38	0.45	0.41	0.47	0.67	0.50	-	0.37	0.48	0.49	0.45	0.42	0.35	0.33	0.45	0.40	0.32	0.46	0.38	0.48	0.44	0.40	0.31	0.25	0.25	0.36	0.41	0.40	0.39	0.32	0.38	0.41	0.45	0.33	0.31	0.46	0.32	0.25	0.33	0.46	0.48	0.46	0.39	0.33	0.37	0.41	0.41	0.43	
pr11	0.36	0.47	0.38	0.46	0.41	0.41	0.47	0.43	0.46	0.47	0.47	0.43	0.46	0.42	0.38	0.46	0.40	0.45	0.46	0.47	0.49	0.41	0.40	0.45	0.31	0.25	0.27	0.45	0.44	0.44	0.42	0.31	0.44	0.46	0.44	0.23	0.30	0.45	0.30	0.41	0.20	0.40	0.35	0.47	0.42	0.41	0.34	0.43	0.42	0.39		
pr12	0.38	0.81	0.44	0.55	0.57	0.60	0.69	0.47	0.47	0.48	0.43	0.82	0.48	0.45	0.44	0.43	0.39	0.48	0.55	0.46	0.51	0.48	0.66	0.59	0.54	0.31	0.26	0.23	0.50	0.59	0.54	0.57	0.42	0.58	0.64	0.63	0.30	0.31	0.50	0.34	0.48	0.25	0.30	0.43	0.47	0.54	0.48	0.45	0.38	0.64	0.47	0.54
pr13	0.39	0.80	0.44	0.55	0.54	0.55	0.68	0.46	0.46	0.49	0.46	0.87	0.48	0.48	0.43	0.39	0.49	0.51	0.41	0.53	0.48	0.65	0.58	0.55	0.31	0.24	0.24	0.46	0.58	0.51	0.57	0.43	0.60	0.64	0.65	0.30	0.31	0.51	0.34	0.46	0.26	0.31	0.45	0.51	0.55	0.47	0.42	0.37	0.62	0.47	0.54	
pr14	0.43	0.47	0.37	0.39	0.50	0.47	0.43	0.48	0.50	0.45	0.42	0.48	0.48	-	0.49	0.38	0.39	0.46	0.47	0.49	0.33	0.42	0.48	0.49	0.42	0.34	0.22	0.42	0.40	0.43	0.44	0.43	0.44	0.46	0.43	0.25	0.39	0.42	0.45	0.50	0.28	0.44	0.40	0.48	0.41	0.41	0.47	0.47	0.45	0.50	0.50	
pr15	0.33	0.49	0.32	0.41	0.44	0.47	0.45	0.43	0.48	0.49	0.47	0.42	0.45	0.48	0.49	0.47	0.43	0.45	0.44	0.51	0.46	0.47	0.44	0.48	0.42	0.35	0.22	0.26	0.41	0.41	0.42	0.41	0.38	0.48	0.47	0.45	0.28	0.38	0.40	0.44	0.50	0.40	0.38	0.44	0.42	0.47	0.36	0.40	0.46	0.41	0.49	
pr16	0.39	0.42	0.43	0.37	0.44	0.42	0.39	0.33	0.35	0.38	0.34	0.41	0.47	0.38	0.42	0.33	0.41	0.47	0.34	0.49	0.43	0.46	0.47	0.35	0.33	0.19	0.24	0.25	0.35	0.28	0.38	0.39	0.47	0.47	0.39	0.25	0.34	0.38	0.28	0.36	0.27	0.25	0.42	0.48	0.44	0.41	0.36	0.39	0.48	0.46	0.45	
pr17	0.39	0.40	0.32	0.38	0.37	0.40	0.40	0.33	0.36	0.33	0.46	0.39	0.39	0.39	0.43	0.33	0.33	0.43	0.47	0.34	0.42	0.36	0.39	0.48	0.29	0.22	0.25	0.52	0.47	0.51	0.44	0.39	0.39	0.42	0.44	0.17	0.31	0.42	0.36	0.46	0.25	0.33	0.44	0.29	0.38	0.41	0.53	0.38	0.44	0.36		
pr18	0.39	0.49	0.38	0.40	0.60	0.51	0.49	0.45	0.46	0.45	0.40	0.33	0.41	0.49	0.46	0.47	0.49	0.47	0.49	0.47	0.42	0.36	0.21	0.23	0.42	0.47	0.40	0.47	0.40	0.46	0.46	0.45	0.45	0.43	0.28	0.37	0.45	0.45	0.36	0.46	0.24	0.36	0.43	0.46	0.51	0.46	0.46	0.41	0.48	0.51	0.44	
pr19	0.38	0.50	0.36	0.47	0.51	0.63	0.50	0.39	0.41	0.40	0.45	0.45	0.41	0.41	0.38	0.44	0.45	0.41	0.49	0.44	0.44	0.45	0.52	0.53	0.47	0.35	0.24	0.25	0.52	0.49	0.51	0.47	0.41	0.49	0.55	0.49	0.23	0.37	0.48	0.40	0.29	0.23	0.41	0.40	0.42	0.52	0.49	0.42	0.54	0.40	0.50	
pr20	0.40	0.42	0.29	0.44	0.51	0.59	0.46	0.46	0.41	0.49	0.51	0.34	0.38	0.32	0.46	0.46	0.41	0.49	0.58	0.57	0.36	0.64	0.45	0.57	0.43	0.34	0.25	0.38	0.64	0.49	0.60	0.46	0.43	0.49	0.52	0.43	0.38	0.40	0.37	0.49	0.61	0.51	0.50	0.50	0.51	0.41	0.41	0.56				
pr21	0.39	0.52	0.48	0.43	0.46	0.47	0.38	0.39	0.44	0.46	0.47	0.51	0.53	0.33	0.46	0.49	0.34	0.46	0.44	0.36	0.41	0.54	0.51	0.42	0.28	0.20	0.24	0.36	0.44	0.40	0.42	0.35	0.50	0.51	0.42	0.32	0.31	0.47	0.32	0.46	0.23	0.31	0.50	0.46	0.60	0.45	0.33	0.53	0.46	0.51		
pr22	0.40	0.48	0.33	0.44	0.52	0.58	0.48	0.37	0.37	0.38	0.49	0.40	0.48	0.42	0.47	0.43	0.47	0.42	0.54	0.64	0.41	-	0.51	0.54	0.45	0.33	0.26	0.30	0.46	0.47	0.47	0.45	0.40	0.54	0.50	0.46	0.25	0.33	0.45	0.42	0.52	0.25	0.37	0.36	0.42	0.46	0.55	0.42	0.50	0.42	0.50	
pr23	0.49	0.64	0.47	0.46	0.56	0.55	0.65	0.49	0.51	0.48	0.41	0.66	0.68	0.48	0.44	0.46	0.36	0.49	0.52	0.45	0.54	0.51	0.75	0.47	0.33	0.24	0.22	0.44	0.58	0.48	0.51	0.43	0.58	0.60	0.58	0.31	0.35	0.51	0.38	0.53	0.29	0.33	0.40	0.57	0.63	0.39	0.39	0.62	0.51	0.72		
pr24	0.40	0.56	0.41	0.42	0.49	0.50	0.56	0.45	0.47	0.44	0.40	0.59	0.58	0.49	0.48	0.47	0.39	0.47	0.53	0.57	0.51	0.54	0.65	0.41	0.31	0.24	0.24	0.45	0.51	0.48	0.45	0.45	0.56	0.55	0.51	0.28	0.36	0.47	0.49	0.66	0.33	0.43	0.28	0.56	0.55	0.72	0.31	0.39	0.59	0.45	0.68	
pr25	0.42	0.57	0.36	0.67	0.48	0.50	0.59	0.39	0.40	0.40	0.45	0.54	0.55	0.42	0.42	0.35	0.44	0.47	0.43	0.42	0.45	0.47	0.43	0.36	0.25	0.27	0.58	0.60	0.60	0.68	0.36	0.46	0.50	0.63	0.24	0.33	0.48	0.33	0.44	0.28	0.36	0.43	0.39	0.44	0.43	0.48						

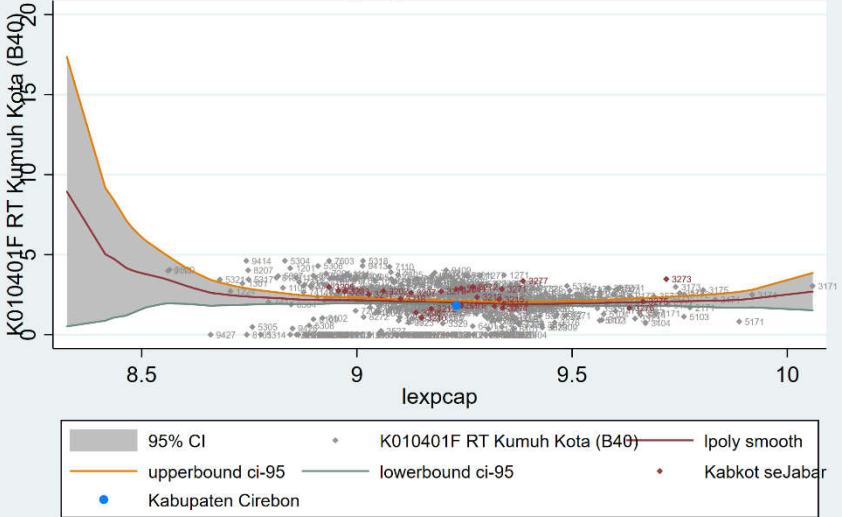
Local polynomial smooth



Local polynomial smooth

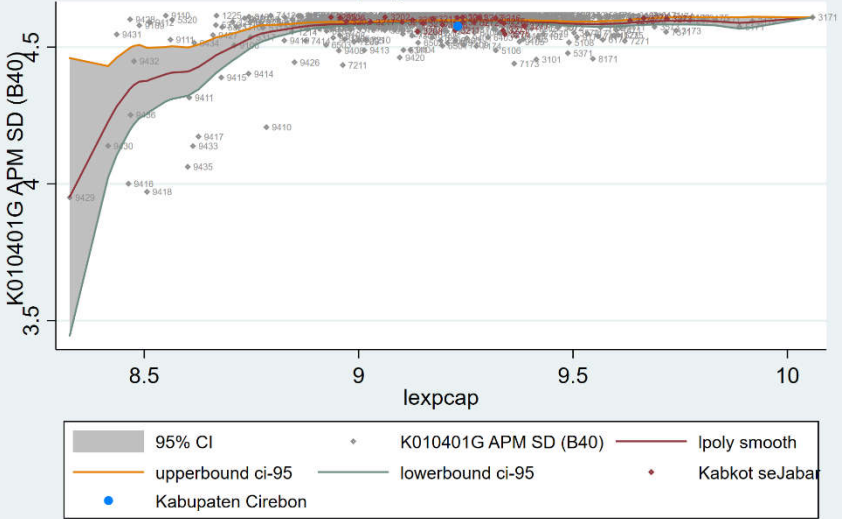


Local polynomial smooth

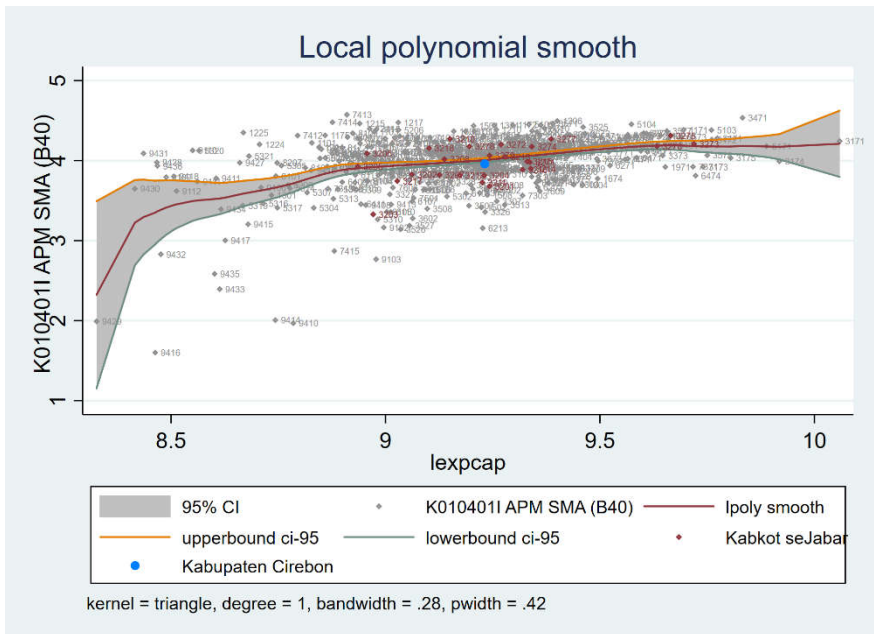
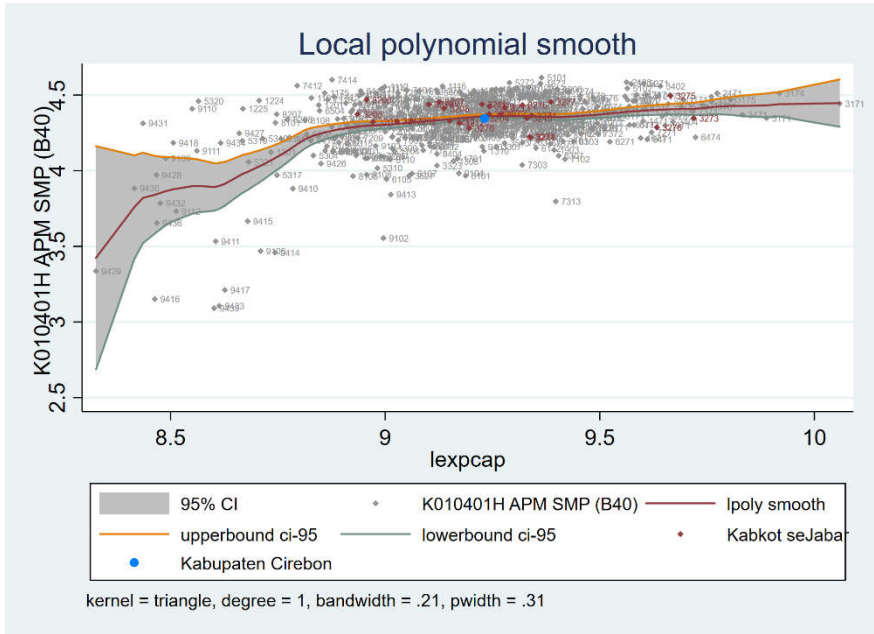


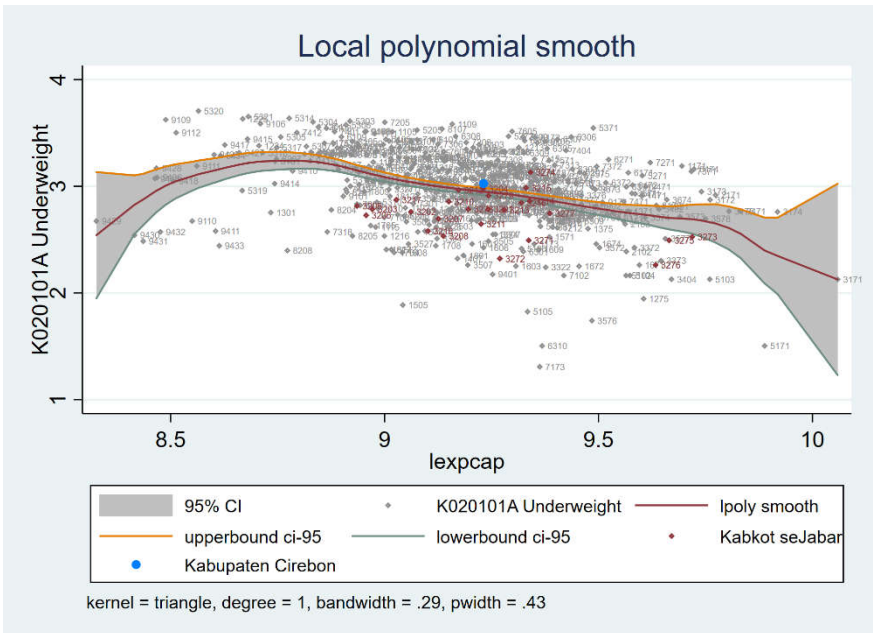
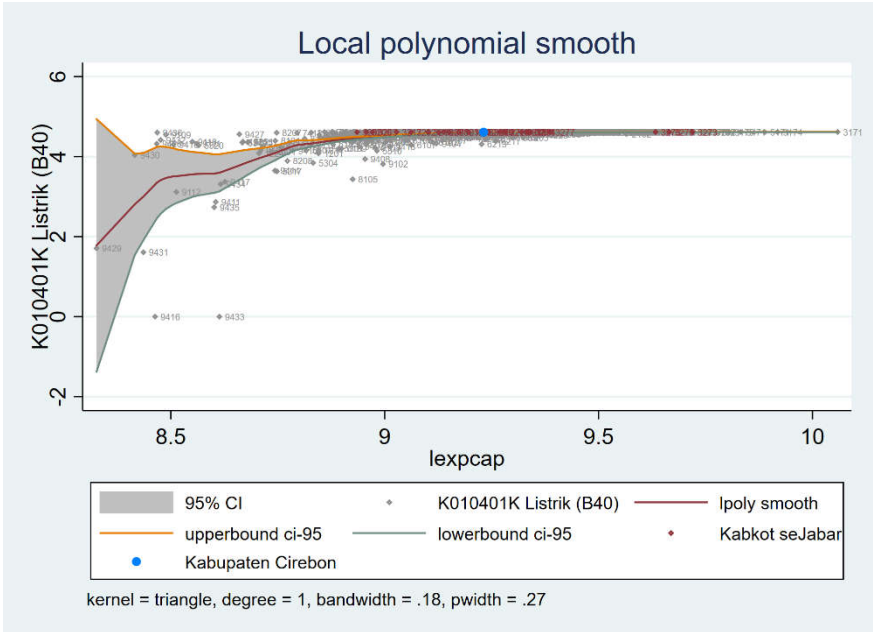
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .39, pwidth = .58

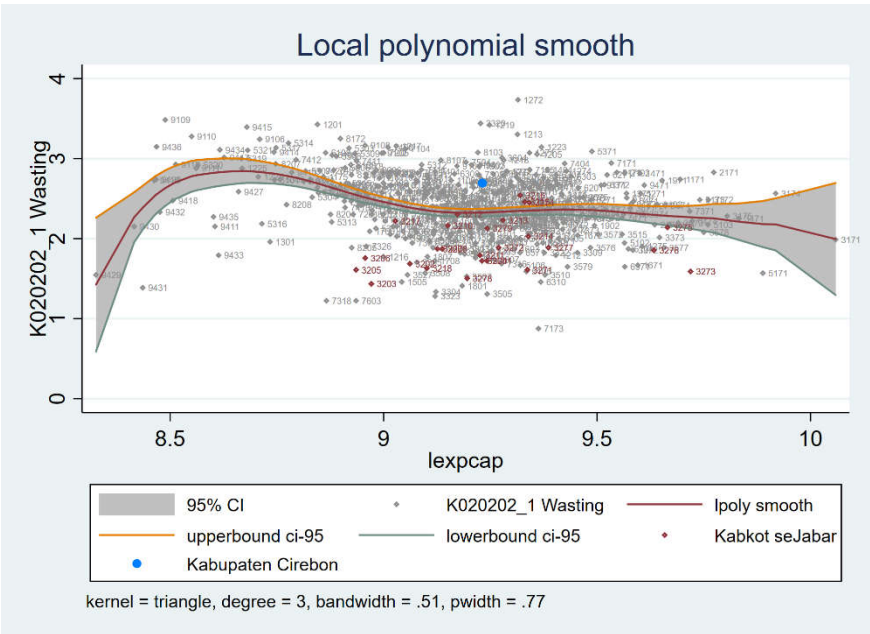
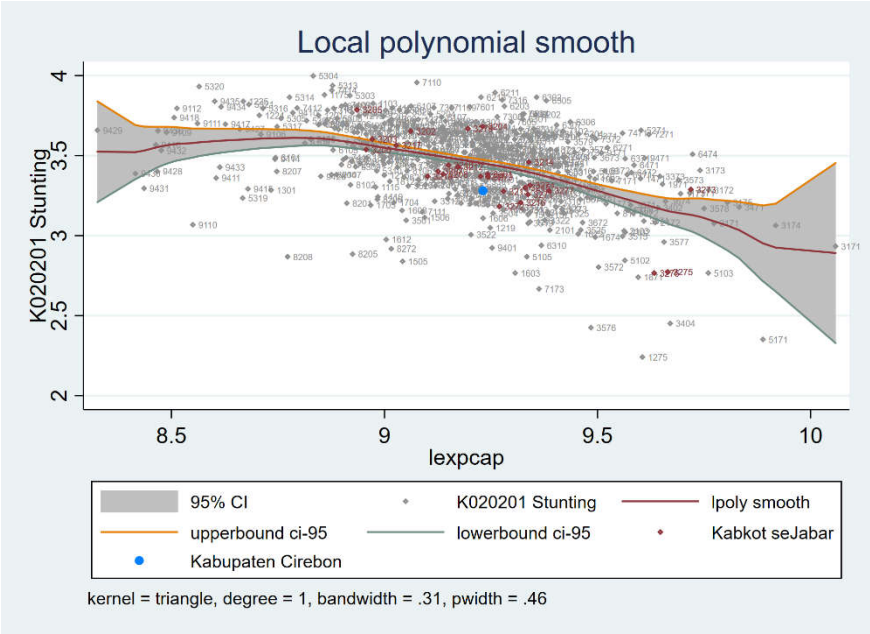
Local polynomial smooth



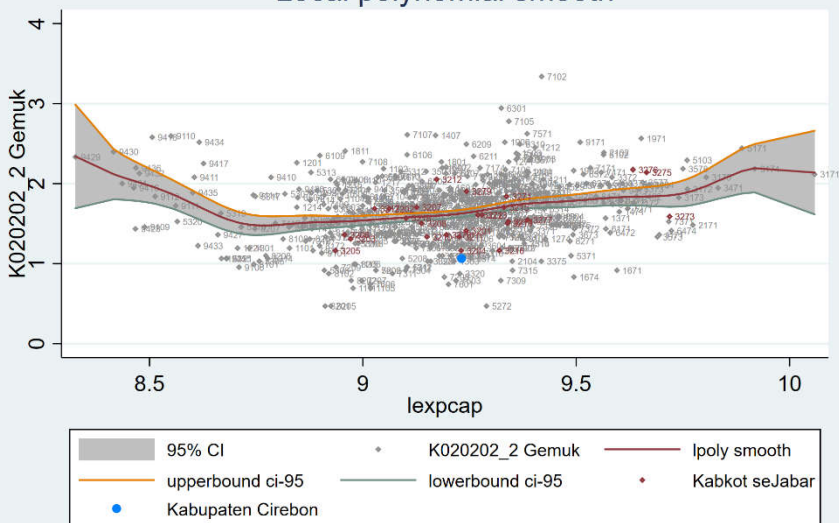
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .16, pwidth = .24





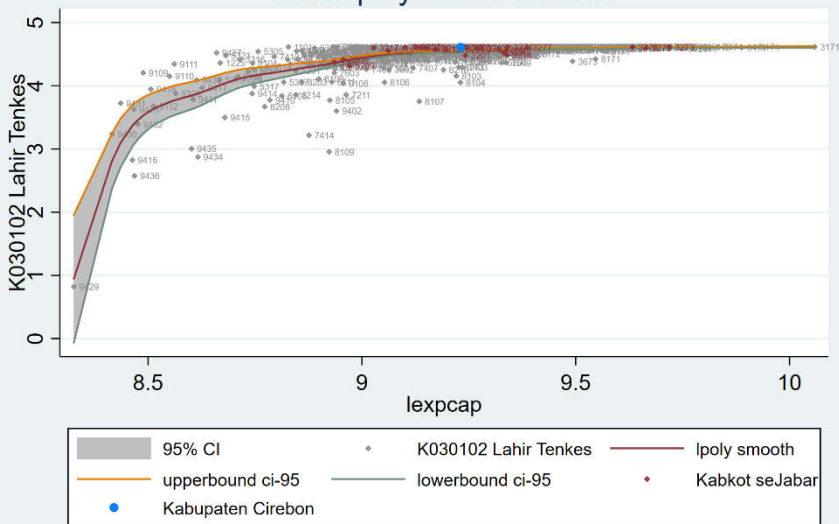


Local polynomial smooth

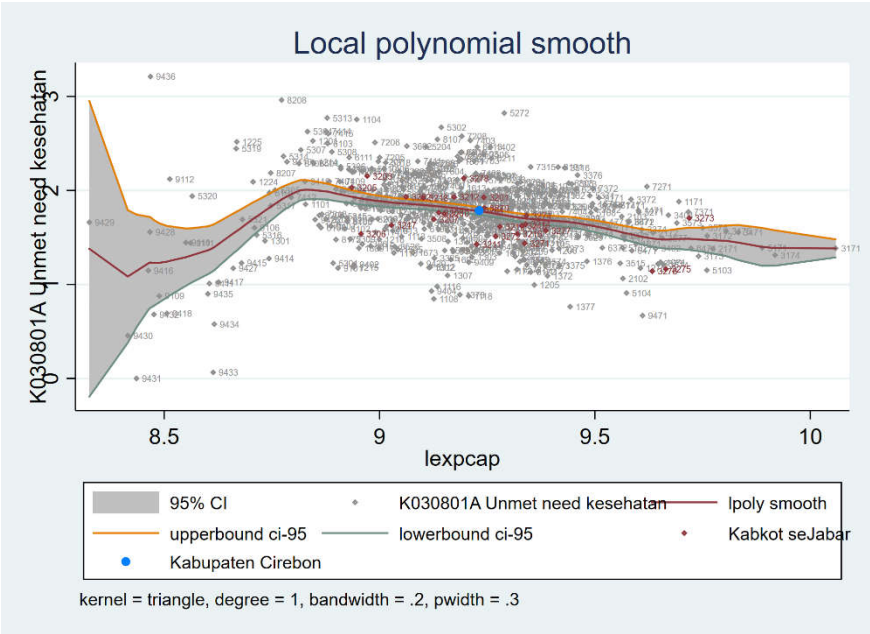
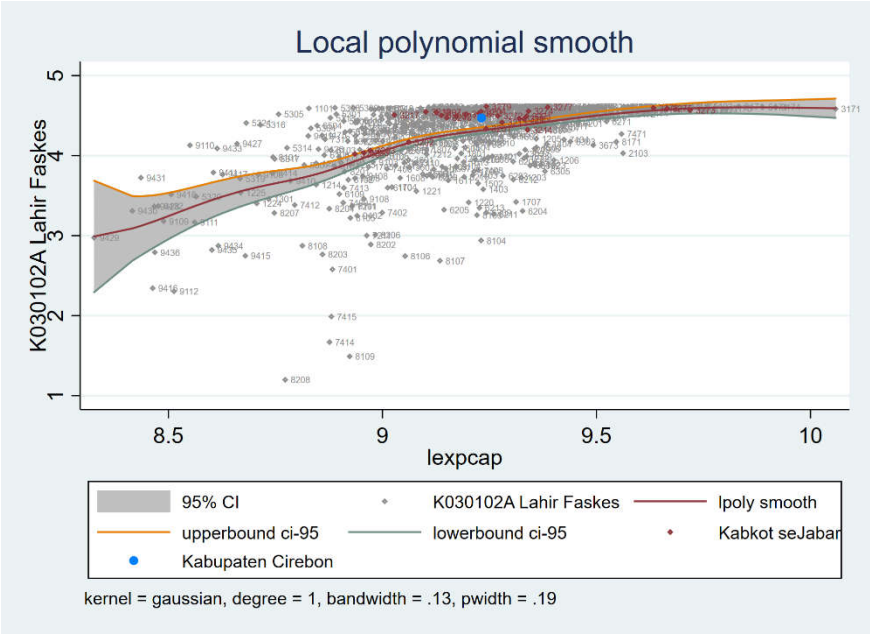


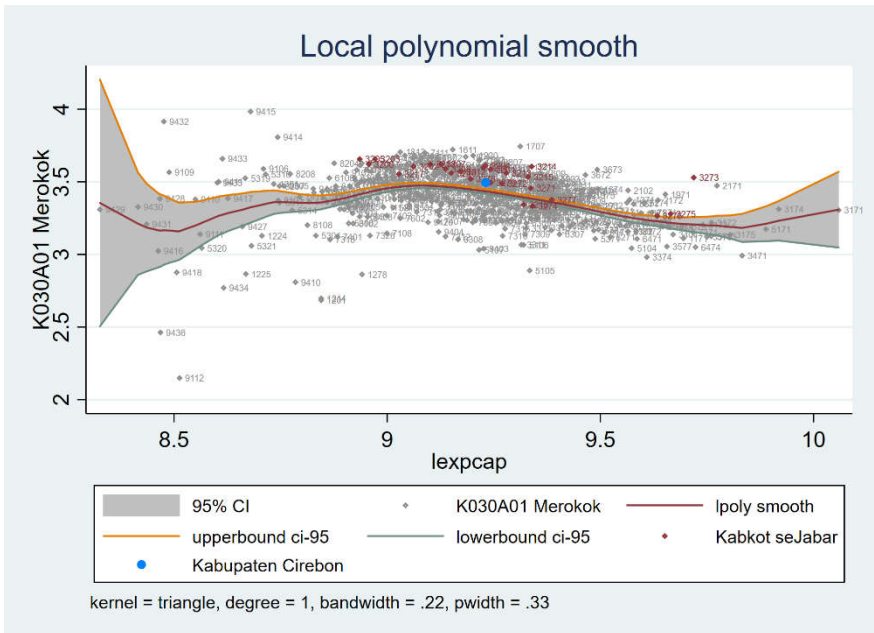
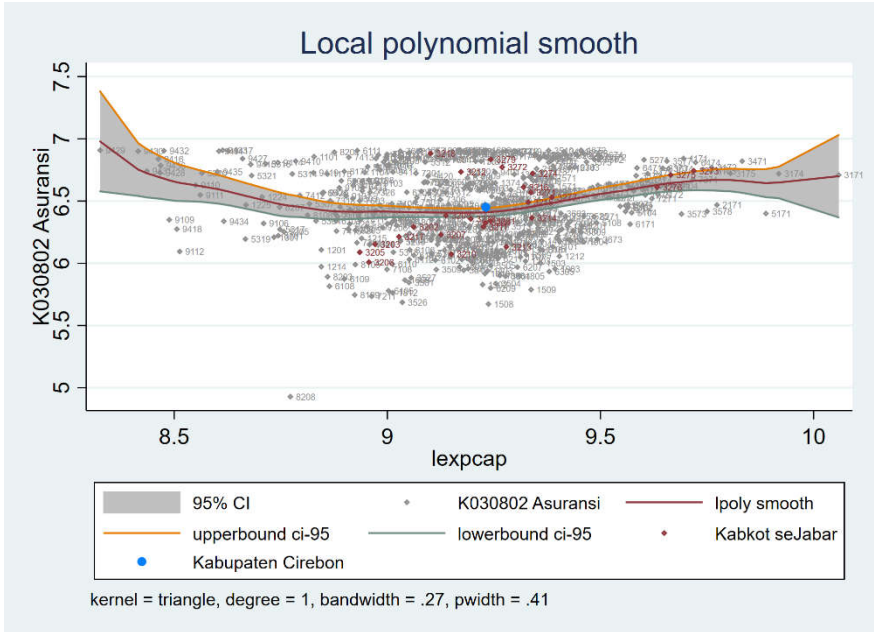
kernel = gaussian, degree = 1, bandwidth = .1, pwidth = .14

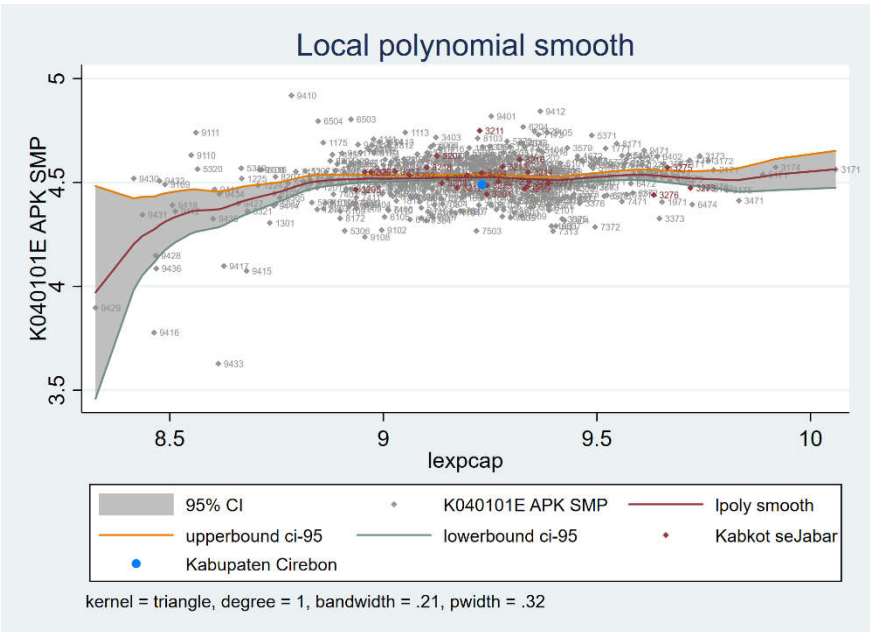
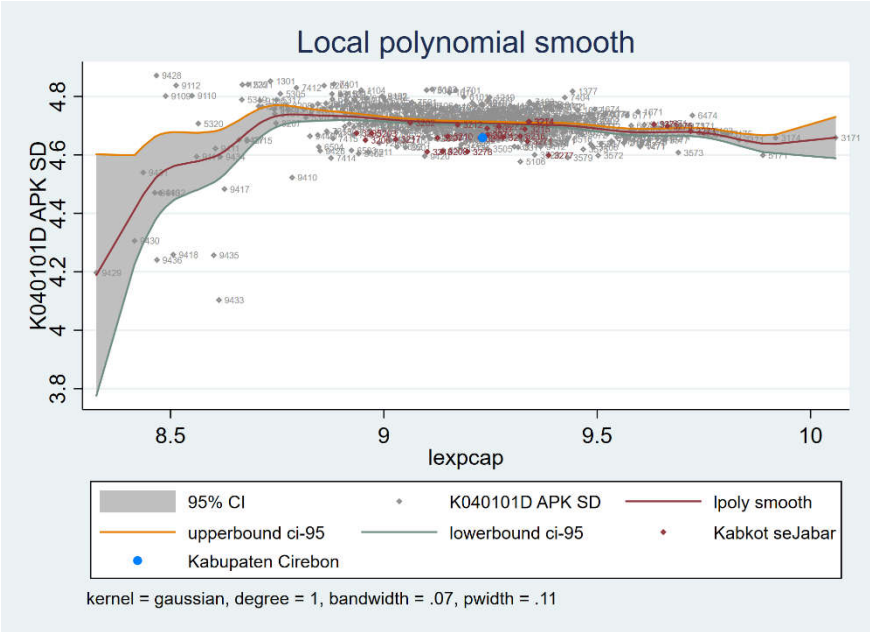
Local polynomial smooth

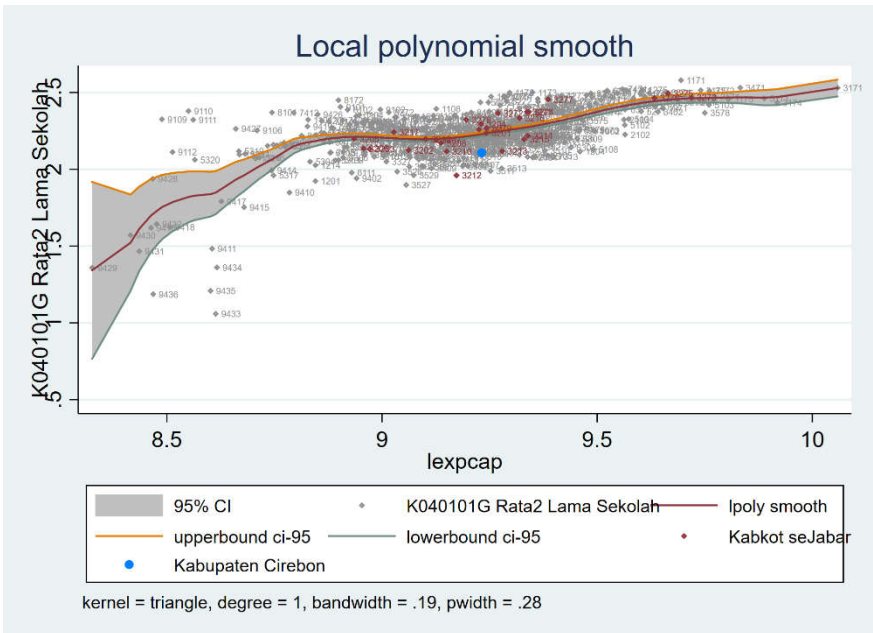
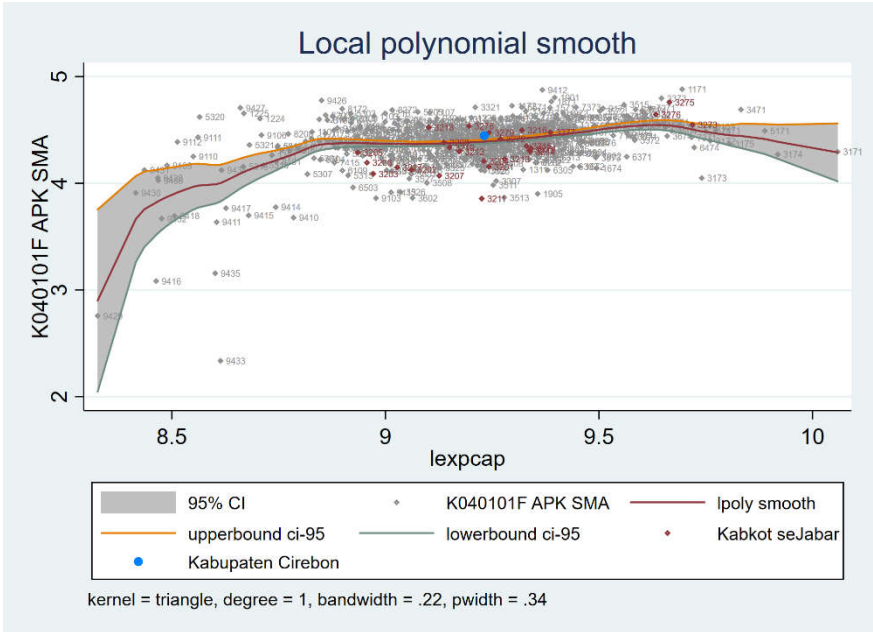


kernel = gaussian, degree = 1, bandwidth = .06, pwidth = .1

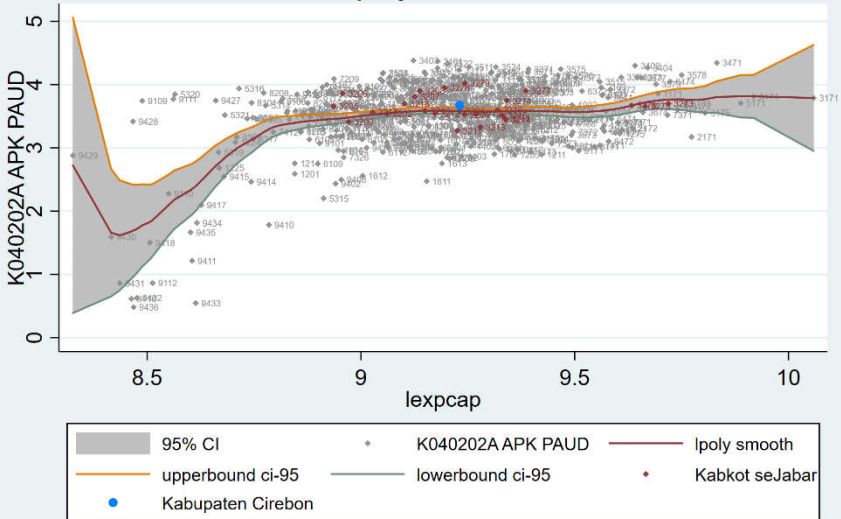






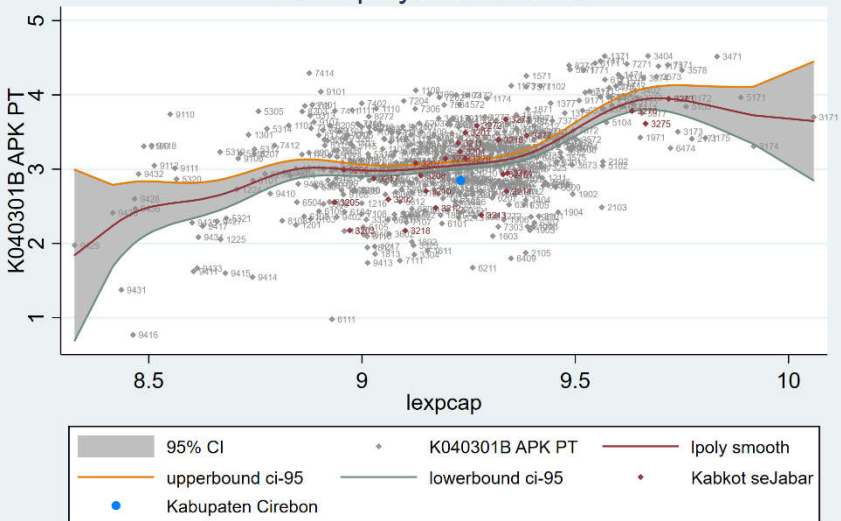


Local polynomial smooth

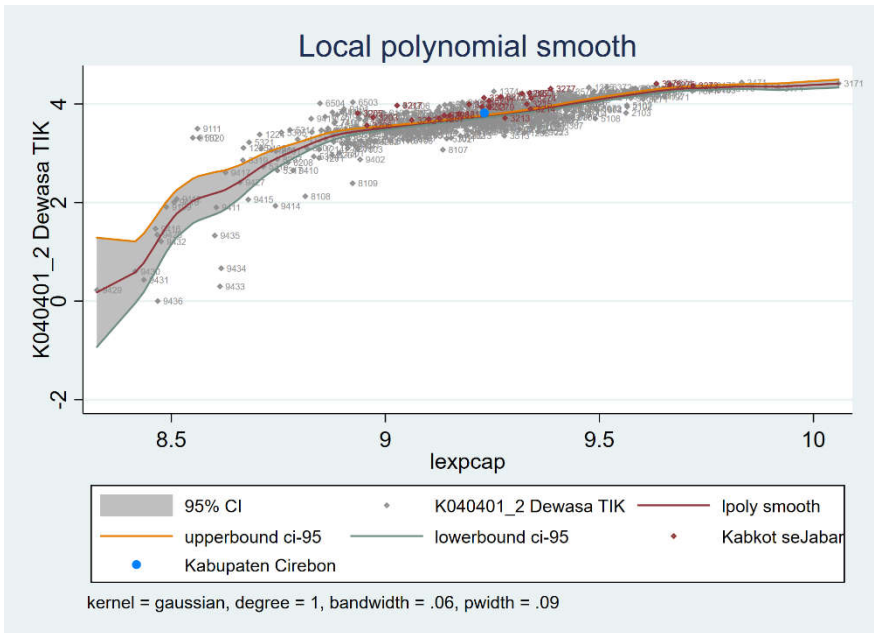
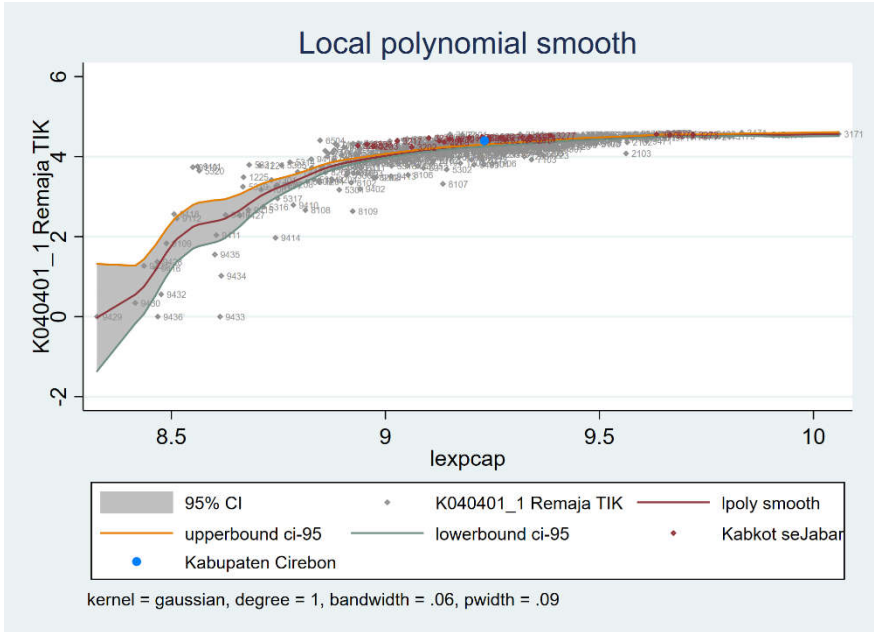


kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .18, pwidth = .27

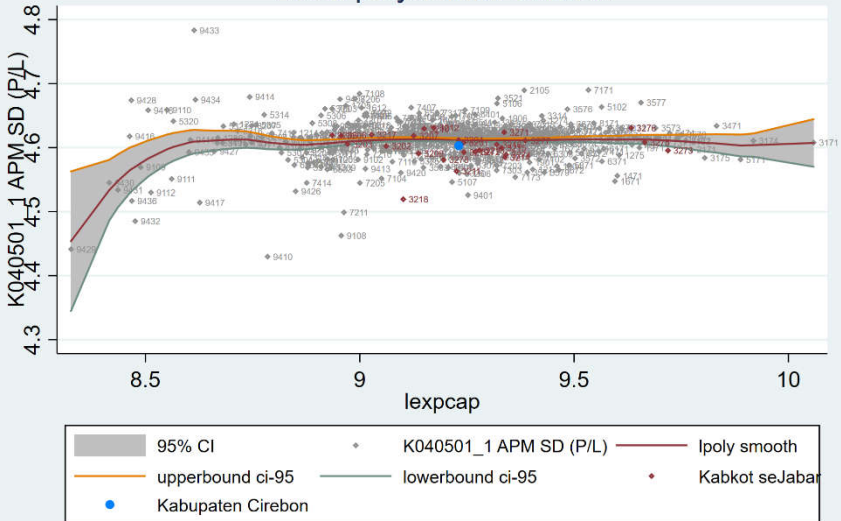
Local polynomial smooth



kernel = gaussian, degree = 1, bandwidth = .11, pwidth = .16

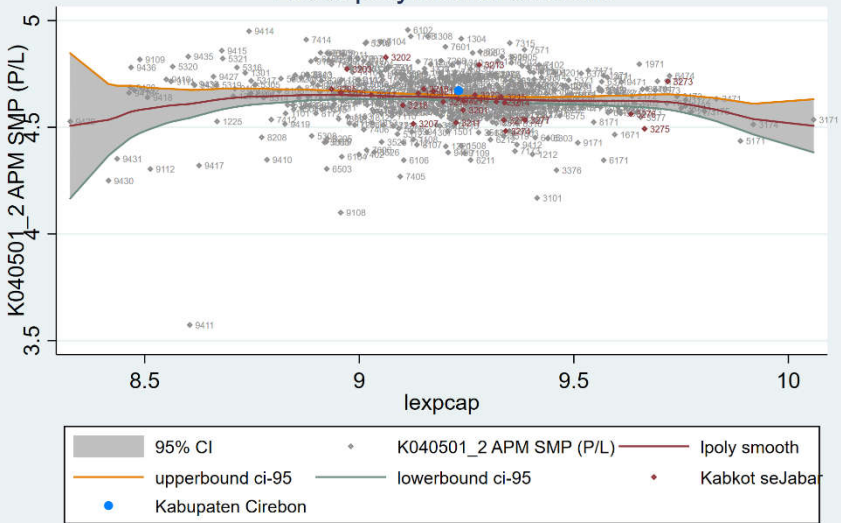


Local polynomial smooth



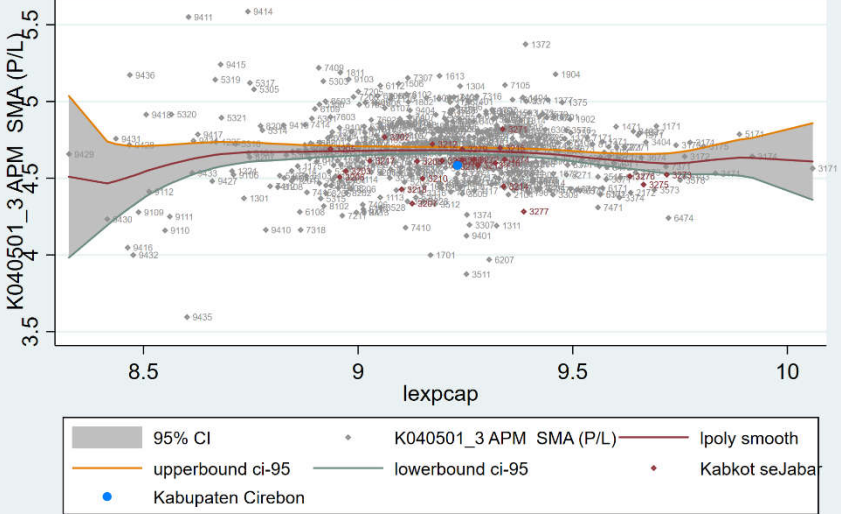
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .26, pwidth = .38

Local polynomial smooth



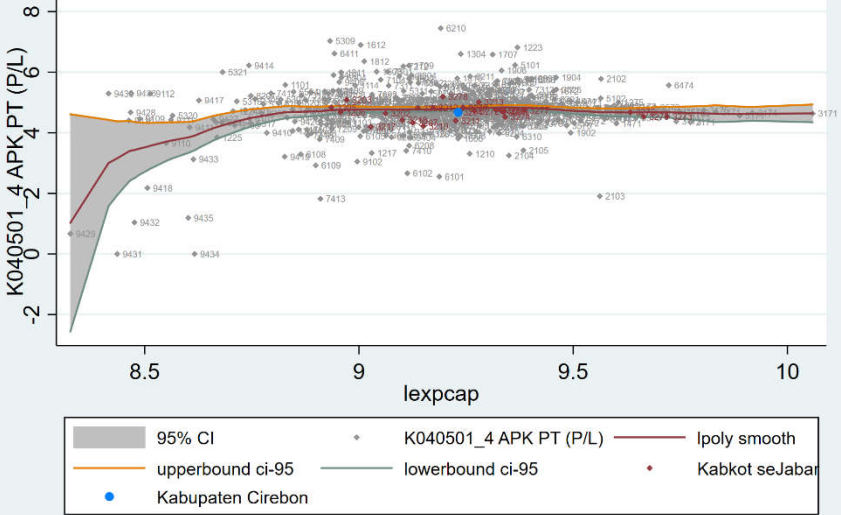
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .35, pwidth = .52

Local polynomial smooth



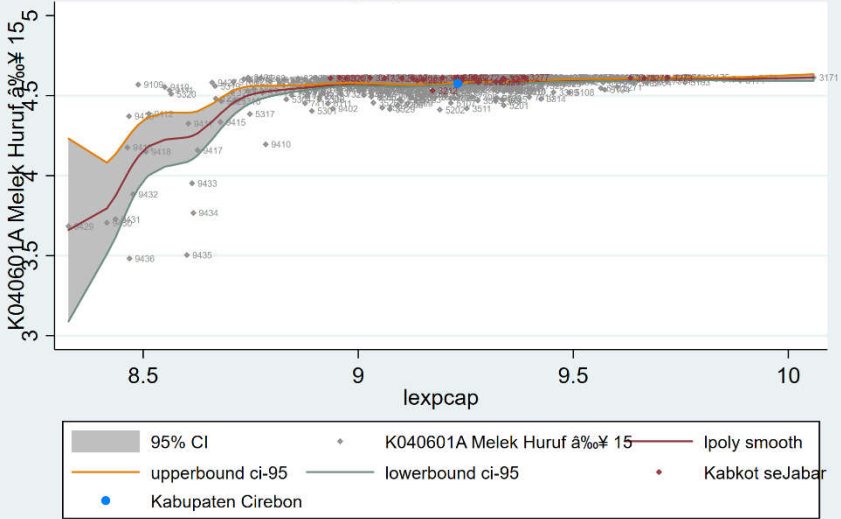
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .36, pwidth = .54

Local polynomial smooth



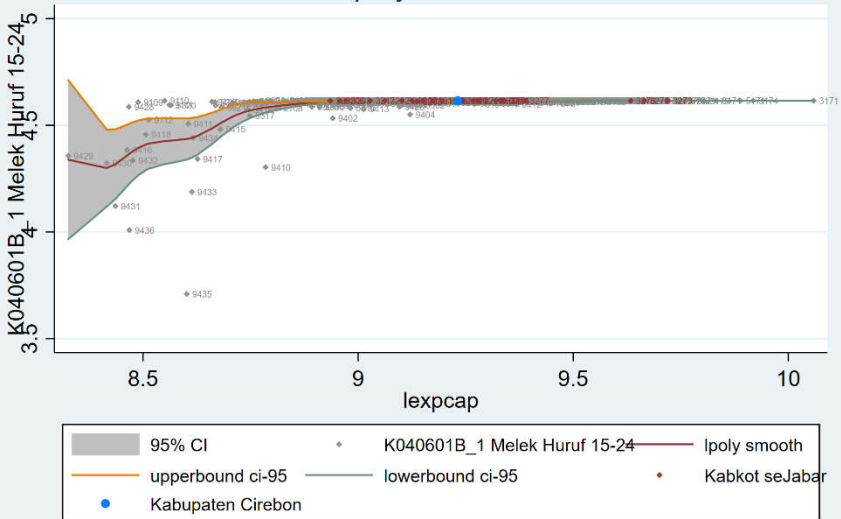
kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .23, pwidth = .34

Local polynomial smooth

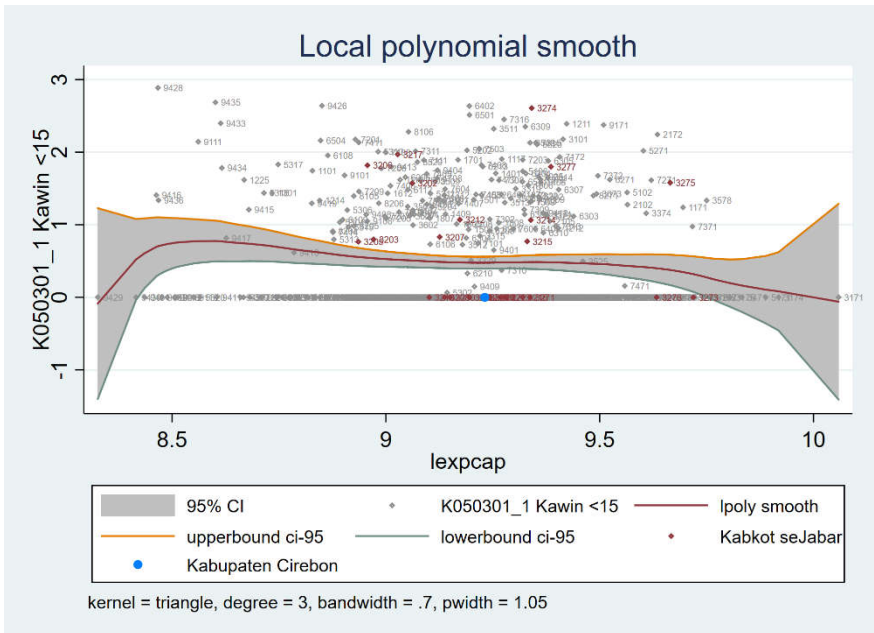
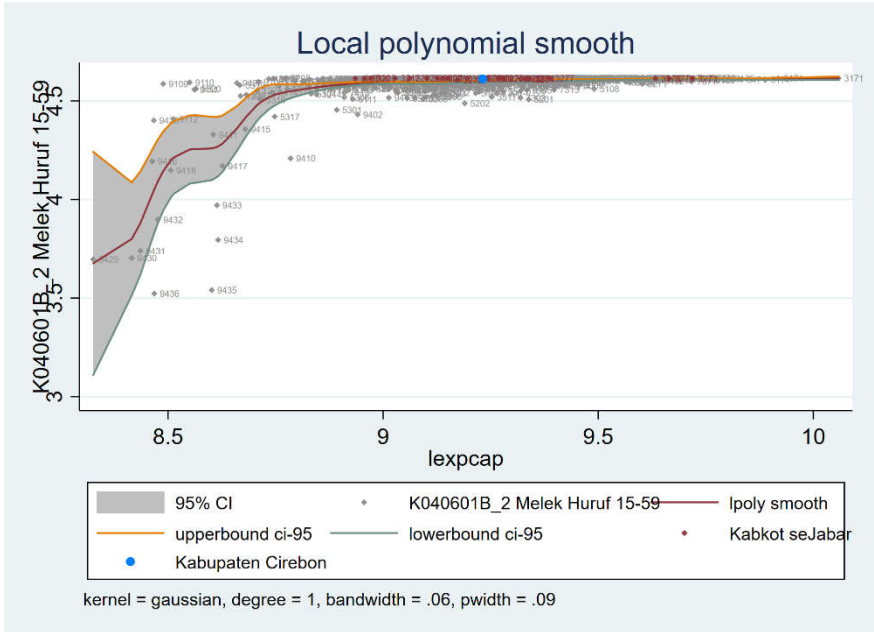


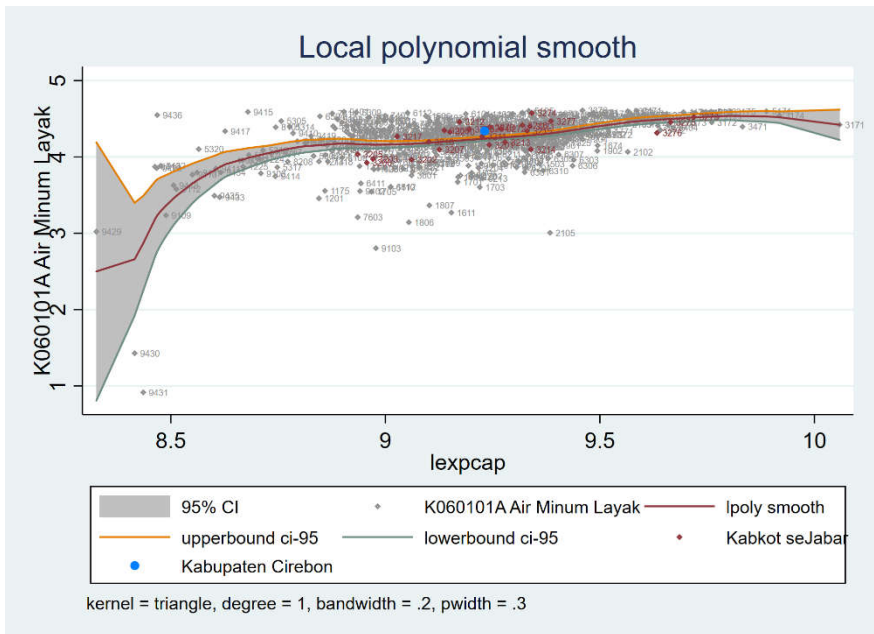
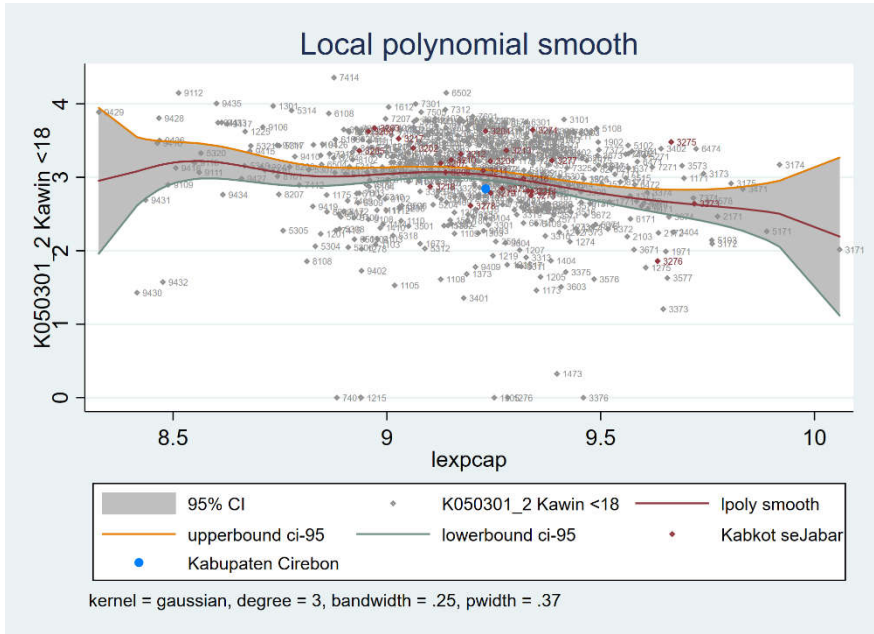
kernel = gaussian, degree = 1, bandwidth = .06, pwidth = .09

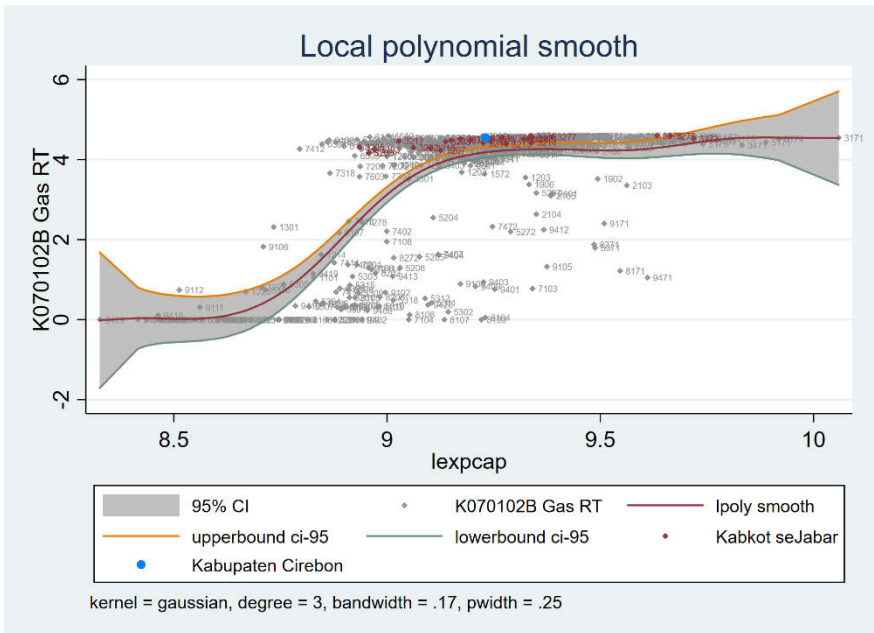
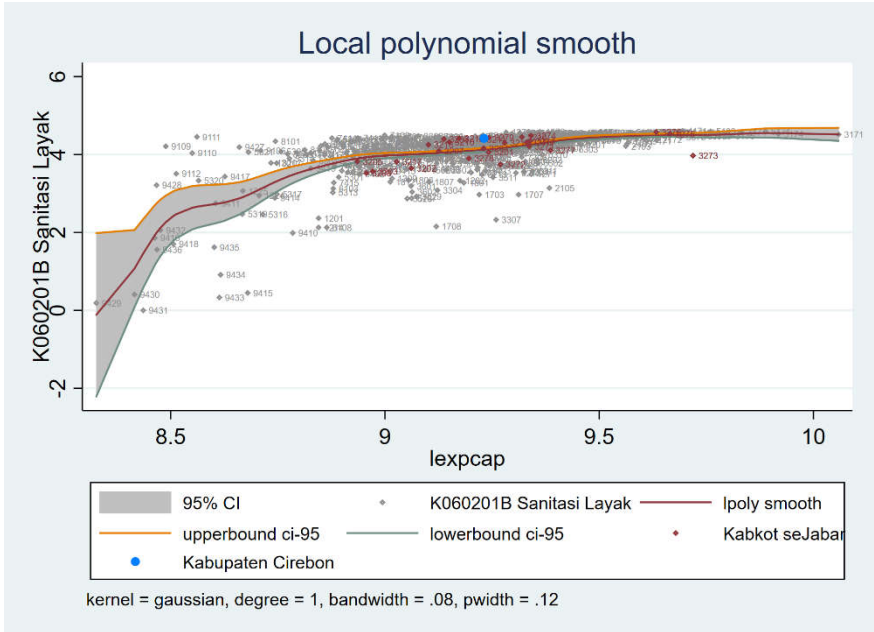
Local polynomial smooth



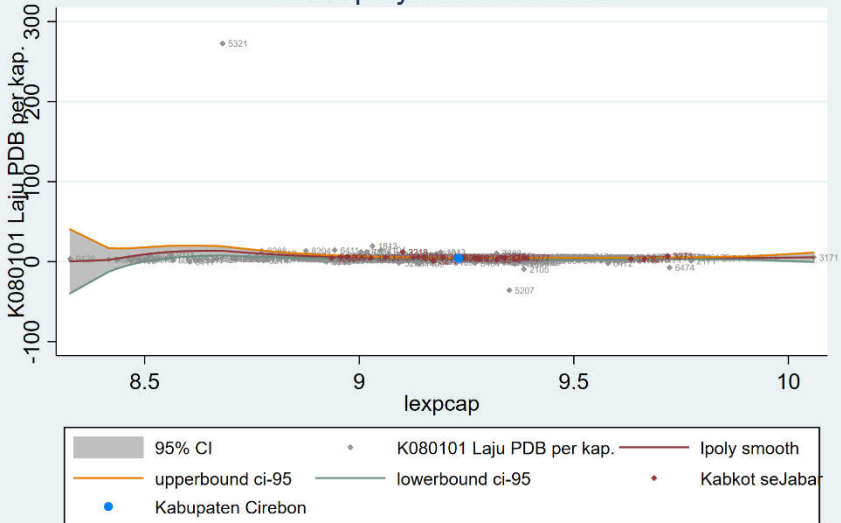
kernel = gaussian, degree = 1, bandwidth = .07, pwidth = .1





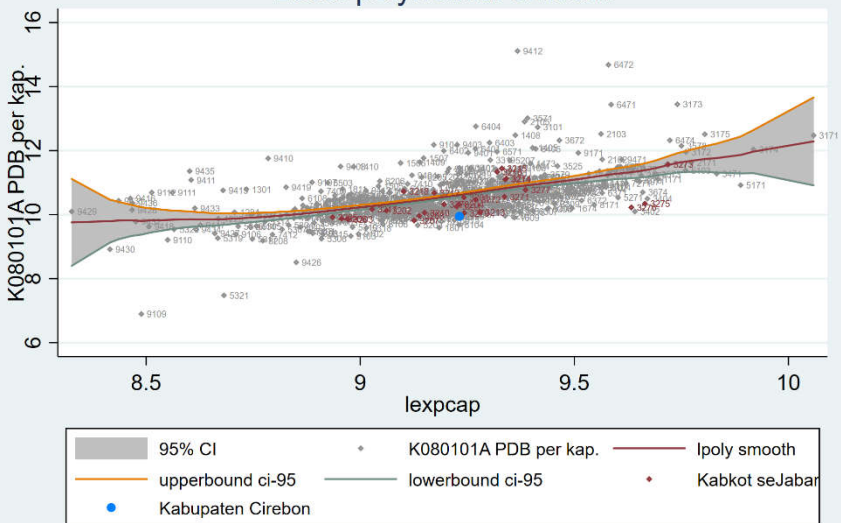


Local polynomial smooth



kernel = triangle, degree = 3, bandwidth = .65, pwidth = .97

Local polynomial smooth



kernel = triangle, degree = 1, bandwidth = .33, pwidth = .5

